



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM), DAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : I
Masa Persidangan : 2023-2024
Rapat Ke- : Ke-6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : Pukul 10.10--13.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
- Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024
- Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
(Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PPP)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
- Hadir : A. Pimpinan
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)
2. Robert Rouw (F-Nasdem)
3. H. Muhammad Iqbal, SE., M. Com. (F-PPP)
- B. Anggota
1) FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
4. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
5. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
6. Ir. Sudjadi
7. Sri Rahayu
8. Harvey B. Malaihollo

9. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
- 2) FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
 10. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 11. Cen Sui Lan
 12. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 13. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 14. Ilham Pangestu
 15. Muhammad Fauzi, S.E.
- 3) FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
 16. Ir. Sumail Abdullah
 17. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 18. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 19. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
- 4) FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
 20. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 21. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 22. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 23. Drs. Fadholi, M. Ikom.
- 5) FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)
 24. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 25. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 26. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 27. H. An'im Falachudin Mahrus
 28. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
- 6) FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
 29. Willem Wandik
 30. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
- 7) FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)
 31. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 32. Ir. H. Sigit Sosiantomo
- 8) FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-
PAN)
 33. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 34. Athari Ghauthi Ardi
 35. Mesakh Mirin, SKM.
- 9) FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
 36. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

la

- Izin :
1. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H. (F-PDI Perjuangan)
 2. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
 3. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 4. (F-PDI Perjuangan)
 5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. (F-Gerindra)
 6. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F-Nasdem)
 7. Sri Wahyuni (F-Nasdem)
 8. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)
- Undangan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. Mohammad Zainal Fatah)
 2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. T. Iskandar, M.T.),
 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. H. Khalawi. AH., M.M., M.Sc.),
 4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.).
 5. Jajaran Kementerian PUPR RI

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Sekjen, Pak Irjen,
Bapak Kepala BPSDM, dan
Kepala BPIW Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya, serta
Hadirin-hadirat yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat berupa kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menghadiri kegiatan di rapat Komisi V.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V yang hadir pada saat ini, Anggota yang hadir berjumlah sekitar 20 orang, kemudian jumlah fraksi ada 7, artinya rapat pada pagi hari ini telah kuorum, maka izinkanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu,
Hadirin-hadirat yang saya hormati,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Kepala BPSDM, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, dengan agenda membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unti Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2023 telah disepakati beberapa hal, diantaranya adalah pagu nota keuangan dalam RAPBN tahun 2024 Kementerian PUPR sebesar 146,98 triliun.

- Dari alokasi pagu tersebut, alokasi anggaran untuk Sekjen adalah sebesar 578,73 miliar, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan, antara lain: reformasi birokrasi, pembinaan, pengelolaan dan pelaporan BMN, serta pembinaan fasilitas infrastruktur daerah; selanjutnya,

- Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar 91,23 miliar, yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan, antara lain: audit, *review*, evaluasi dan pengawasan internal Kementerian PUPR; sedangkan,

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memperoleh alokasi anggaran sebesar 425,14 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan, di antaranya: pelatihan ASN, pengembangan talenta dan pendidikan vokasi Politeknik PU; kemudian,

- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPI... BPIW mendapatkan alokasi anggaran sebesar 142,33 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di antaranya: melakukan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur PUPR terpadu dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini, kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu ini agar tiap-tiap unit Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian PUPR, antara lain:

1. Perlu meningkatkan koordinasi internal di lingkungan Kementerian PUPR demi mewujudkan kinerja birokrasi yang lebih efisien;
2. Perlu meningkatkan koordinasi lintas sub sektor dalam memantau dan tindak lanjut hasil audit *review*, evaluasi dan pengawasan internal;
3. Perlu meningkatkan kompetensi SDM bagi para ASN sesuai bidangnya masing-masing;
4. Perlu meningkatkan keterpaduan sinkronisasi dan penajaman lokus dalam perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Bapak-Ibu,
Hadirin-hadirat yang saya hormati,

Demikianlah pengantar dari kami.

Selanjutnya kami persilakan kepada yang pertama, Pak Sekjen kemudian nanti dilanjutkan Pak Irjen dan Bapak Kepala Badan Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasannya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

Silakan Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI, dalam hal ini pada sesi ini dipimpin oleh Pak Iqbal,

Ibu-Bapak para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Izinkan kami menyampaikan dan melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Namun sebelumnya, kami ingin menyampaikan kembali bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, di Sekretariat Jenderal ini terdiri dari 7 biro dan 3 pusat.

Di mana fungsi Biro terdiri dari:

1. Biro Perencana Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
2. Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Umum;
5. Biro Hukum;
6. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Biro Komunikasi Publik; dan

3 pusat yaitu:

1. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan P
3. usat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Di tahun 2000 yang akan datang sasaran strategis yang di lakukan oleh Sekretariat Jenderal ini di fokuskan pada 3 yaitu:

1. Peningkatan kepuasan layanan admisnistrasi Kementerian PUPR;
2. Integrasi sistem informasi sebagaimana banyak diarahkan; kemudian
3. Peningkatan kesehatan organisasi.

Dalam hal upaya peningkatan layanan administrasi Kementerian PUPR, ini diupayakan dengan berbagai cara: yang pertama adalah meningkatkan layanan pengelolaan perencanaan keuangan, BMN, umum, data dan informasi. Kemudian kami juga melaksanakan peningkatan layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai.

PUPR memiliki jabatan-jabatan fungsional yang diampu yang para pejabatnya, bukan hanya di Kementerian PUPR di pusat, namun juga di pemerintah daerah atau kementerian yang lain yang memiliki formasi untuk jabatan fungsional ke-PUPR-an.

Kami juga melaksanakan peningkatan dalam hal layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum. Kami juga melakukan peningkatan fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah. Dan tentu sebagai kementerian yang juga harus terus berkomunikasi dengan publik, kami juga terus meningkatkan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan tentu berorientasi kepada publik.

Dan kami meningkatkan juga layanan kajian dan pemantauan kebijakan terutama kebijakan-kebijakan kementerian yang sedang dijalankan. Dalam hal integrasi sistem informasi karena dengan pegawai yang lebih dari 40 ribu orang di seluruh Indonesia, kami melakukan integrasi sistem informasi ini dalam rangka melakukan transformasi layanan digital terutama untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang diantaranya adalah dalam hal layanan perizinan data dan informasi serta terkait dengan perumahan.

Untuk peningkatan kesehatan organisasi, kami melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kementerian PUPR sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diampu oleh Kementerian PAN-RB. Kami juga melakukan peningkatan kualitas tata kelola keuangan, oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, karena umumnya tata kelola pedoman peraturan disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan kami harus memastikan bahwa tata kelola yang baru pedoman-pedoman itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh aparatur yang ada di Kementerian PUPR. Dan kami juga terus berusaha meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP di Kementerian PUPR dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh kementerian yang mengampu pendayagunaan aparatur.

Pada tahun 2024 nanti, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan, bahwa pagu anggaran Sekjen ini di tetapkan 578,73 miliar.

Berdasarkan jenis belanjanya, pagu belanja pegawai dialokasikan sebesar 91,52 ini kurang lebih 15%...15,81%. Kemudian belanja modal dialokasikan sebesar 27,46 miliar, ini 4,74%. Dan untuk belanja barang mencapai 459,75, ini hampir 80% yaitu 79,44%, yang terdiri dari belanja barang oprasional sebesar 195,66 miliar atau 33,82%, serta belanja barang non oprasional sebesar 264,09 miliar atau 45,6%.

Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal yaitu: satu terkait dengan pengelolaan perencanaan, ini sebesar 44,48 miliar dengan target layanan utama adalah administrasi pelaksanaan

anggaran di 703 Staker. Jadi kami meng-*handle* 703 Satker yang *update*-nya yang status penyerapan dan yang lain-lainnya dilakukan di Biro PKLN.

Kami juga harus menyelasikan dan meng-*update* setiap 3 bulan 45 rencana aksi nasional atau program tematik lainnya. Ini umumnya diampu oleh kementerian-kementerian koordinator atau kementerian teknis lainnya yang terkait dengan tugas ke PUPR-an. Di dalamnya juga beberapa rencana aksi seperti Stranas... Stranas PK yang diampu oleh komite pemberantasan korupsi.

Dan kami juga melakukan pemantauan terhadap 41 register pinjaman dan 16 hibah luar negeri, yang bersumber dari lembaga-lembaga pembangunan internasional, seperti Bank Dunia, Bank bangunan Asia maupun negara-negara berdasarkan pinjaman bilateral.

Kemudian pagu tersebut juga dialokasikan untuk pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana ini sebesar 27,65 miliar. Dengan target layanan utama adalah layanan data dan informasi melalui e-HRM untuk 38,224 orang pegawai, serta layanan manajemen SDM sebanyak 20.236 pegawai, ini adalah jumlah pegawai negerinya sementara sisanya adalah pegawai non PNS.

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Dalam hal pengelolaan keuangan dialokasikan sebesar 23,7 miliar dengan target layanan utama adalah fasilitasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan. Karena Satkernya ada 703, maka laporan konsolidasi laporan keuangan juga mencakup 703 kuasa pengguna anggaran atau barang. Yang tentu ini adalah laporan tahun 2023, laporan berjalan karena kita finalkan nanti dan 12 laporan PHLN, serta penyusunan 8 LSP bidang keuangan, penyusunan 10 laporan pengendalian, penetapan 4.176 pejabat perbendaharaan.

Jadi dalam hal pengelolaan pengendalian penetapan pejabat perbendaharaan ini setahunnya, tahun ini paling *nggak* sudah teregister ada 4.176. Pembinaan 3 angkatan jabatan fungsional pranata keuangan dan analisis pengelolaan keuangan APBN di Kementerian PUPR, serta menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan target 85% yang telah sesuai dengan rekomendasi. Sebagaimana kemarin sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri, kami terus menyelesaikan hal ini terutama juga bergandengan tangan dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan *profiling* sehingga mereka-mereka yang belum menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi BPK itu akan ditunda kenaikannya, mutasinya maupun promosinya.

Dalam hal pengelolaan umum, ini dialokasikan sebesar 175,99 miliar, dengan target layanan 13 lokasi rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung. Ada 30 lokasi pemeliharaan lanskap dan prasarana lingkungan, 23 lokasi perbaikan sarana utilitas, layanan poliklinik kantor pusat, penyelenggaraan 115 kegiatan protokoler ini berdasarkan *time series* yang bisa kita catat dari

beberapa tahun sebelumnya, kemudian pembinaan 220 orang petugas keamanan serta pemantauan dan evaluasi penggunaan ID Card pegawai yang makin kita tingkatkan untuk menghindari penggunaan-penggunaan yang tidak legal.

Kemudian dalam hal pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum, dialokasikan sebesar 20,41 miliar dengan target layanan antara lain penyusunan 39 peraturan produk hukum, 75 penanganan dan pendampingan perkara, ini umumnya adalah sengketa lahan, kemudian 1 laporan dokumentasi dan informasi hukum, 1 kegiatan monitoring kepatuhan intern, 25 fasilitasi penyusunan kerjasama antar kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dan penyediaan pendapat hukum serta melayani informasi produk hukum peraturan perundang-undangan melalui JDIH.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara ini dialokasikan sebesar 38,01 miliar, dengan target layanan utama antara lain monitoring dan evaluasi serta percepatan pelaksanaan penggunaan pemindahtanganan penghapusan optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMN di 38 Provinsi. Dapat kami tambahkan Ibu-Bapak sekalian, bahwa dalam rangka melaksanakan program nasional sertifikasi BMN dari 100% yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan lebih kurang 80% diantaranya dikerjakan di Kementerian PUPR.

Kemudian dalam hal pengelolaan barang milik negara ini juga dilakukan percepatan tindak lanjut LHP 2019-2021 yang terkait terutama yang *nge-hit* belakangan adalah aset konsesi jalan tol. Kemudian penyusunan laporan BMN *audited* dan *unaudited* 2023 dan laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024. Target sertifikasi BMN pada tahun 2023 ini mudah-mudahan kita akan melampaui seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu 33.689 bidang. Jadi kalau Ibu-Bapak menyimak laporan Kementerian Keuangan, sesungguhnya 80% diantaranya dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Dalam hal penyelenggaraan dan pembinaan informasi public, ini kami alokasikan 46,55 miliar dengan target layanan utama ada 712, ini sekali lagi berdasarkan *series* data yang kita coba *capture*, ini kita siapkan berupa siaran pers, kita juga lakukan 3.000 unggahan di 4 media sosial Instagram Kementerian PU sudah mencapai 1 juta *followers*. Ini menjadi sejarah sendiri bagi kami, mudah-mudahan PUPR terus tetap berkomunikasi dengan publik dan kami juga terus bisa menangkap apa yang menjadi *concern* dan keinginan publik untuk kami layani.

Di penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik ini juga yang dilakukan 286 publikasi di berbagai media dan 729 bahan informasi, Pimpinan. Permohonan informasi publik 100% terlayani, ini target kami dan tentu penyelenggaraan PPID *komplain* manajemen atau *komplain handling* juga ada di unit ini. Kemudian dalam hal pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sebesar 34,49 miliar, dengan target layanan utama adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 255 laporan atau yang juga ada 1.700

kebijakan menteri, kemudian 16 *policy brief* atau *policy memo* dan pembinaan 179 Jabfung analis kebijakan.

Dalam hal pengelolaan data dan teknologi informasi bidang PUPR dialokasikan sebesar 133,94 miliar, dengan target layanan utama, antara lain: Layanan data dan informasi terhadap 38.224 pegawai PUPR dan publik, ini mencakup *unstructured* data sampai 700 terabyte dan *structured* data hingga 20 *terabyte*. Layanan teknologi informasi untuk para pegawai PUPR, kemudian manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik kami telah mencapai indeks, ini diukur oleh pihak lain.

Pada tahun 2022, kami sudah mencapai katagori baik dan target di tahun 2024 nanti akan kita... kami menginginkan untuk bisa mencapai pada indeks sangat baik. Dan *alhamdulillah*, Kementerian PUPR selalu diminta untuk mendampingi beberapa kementerian untuk bisa saling belajar dan mengambil hal-hal baik yang sudah di lakukan di Kementerian PUPR.

Untuk pengolahan portal perizinan, ada 9 perizinan yang ada di Kementerian PUPR. Kita sudah integrasikan dan ini sesungguhnya merupakan kementerian pertama yang melakukan integrasi sistem dengan OSS terutama di SIMBG. Kemudian manajemen 2 super *apps*, yang satu untuk internal yang satu untuk eksternal PUPR, yang di antaranya yang kami sudah kenalkan kepada para pegawai adalah Bravo yang di dalamnya kita juga para pegawai juga bisa melakukan absensi, yang akan ke-*detect* di mana dia melakukan absensinya.

Manajemen 30 ribu akun *work collaboration*, manajemen data bencana ini sudah mencapai 7.100 pengguna biasanya dari prakiraan yang diberikan oleh BMKG, kami akan kelola diolah kemudian kita bisa mendeliniasi berapa infrastruktur PU yang kemungkinan akan terdampak atas bencana tersebut dan ini selalu disiapkan secara priodik. Nanti kami juga pada tahun depan menyiapkan 6 *MoU* atau perjanjian kerja sama pertukaran data antar kementerian lembaga dan manajemen aplikasi. Pertukaran data terutama yang sekarang mulai banyak adalah tentang IKN. Sebagaimana pernah kami sampaikan laporkan sebelumnya bahwa di Pusdatin juga disiapkan *command center* untuk IKN, di mana kita bisa memonitor, misalkan berapa alat berat yang ada di lapangan, berapa yang bergerak, berapa alat berat yang diam mesinnya tetap nyala, ada juga mungkin alat berat yang sedang tidak bekerja. Dan untuk ini juga para pekerja di IKN juga kami lakukan menggunakan Bravo, oleh karena itu, kami tahu berapa orang yang bekerja, sedang bekerja di IKN. Dan terakhir berdasarkan rencana aksi atas hasil kajian KPK maka kami juga mengerjakan dan *alhamdulillah* sudah selesai sistem informasi yang terkait dengan bantuan pemerintah. Mungkin di dalam terminologi kita, kita gunakan sebagai padat karya di lingkungan PUPR.

Untuk penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah, dialokasikan 33,51 miliar dengan target layanan utama, antara lain: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik terhadap 517 Pemda penerima DAK tahun 2024. Kemudian tentu karena ini menyangkut perencanaan tahun berikutnya maka

pada tahun 2024 juga akan dilakukan sosialisasi kebijakan DAK tahun 2025 kepada Pemda.

Kami melakukan juga tugas-tugas verifikasi data dan penilaian usulan DAK. Kemudian melakukan bimbingan teknis untuk penerapan standar pelayanan minimum... pelayanan minimal bidang PUPR kepada baik itu provinsi, kota, maupun kabupaten. Untuk meningkatkan kualitas memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR juga melakukan transformasi yang tadi dilaporkan sebelumnya, khususnya dalam bidang layanan publik dengan kita mengembangkan dan terus menggunakan Bravo PUPR yang dengan super *apps* ini kita bisa menjalankan aplikasi *mobile* secara terintegrasi dengan fitur, antara lain: *presensi*, *human resources management*, kinerja, *e-monitoring* ini seluruh *project*. Untuk *e-monitoring* ini sudah juga digunakan oleh beberapa kementerian yang bekerjasama dengan kami, kemudian JDIH, TNDE dan berita PUPR yang sifatnya *flash*. Kemudian dalam pelayanan publik terpadu, kami sudah menjalankan modernisasi pelayanan publik bukan hanya secara fisik tapi juga sistemnya sudah dilakukan perbaikan.

Untuk portal perizinan bidang PUPR untuk kemudahan dan percepatan berusaha yang telah terintegrasi dengan OSS, ini kami bekerjasama khususnya bekerjasama erat dengan rekan-rekan di BKPM. Ini sejak OSS ini dulu ada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian pindah ke BKPM, kami sudah lakukan koordinasi dan bahkan mengintegrasikan aplikasi ke dalam OSS. Untuk *e-keuangan* ini kami lakukan untuk memastikan kemudahan pelayanan keuangan secara terintegrasi dan memudahkan pengendalian.

Untuk portal data spasial infrastruktur PUPR kami sediakan dikerjakan di Pusdatin, sehingga seluruh data dapat diakses oleh masyarakat melalui platform sistem informasi geospasial infrastruktur. Kemudian *command center* IKN ini dapat diakses secara umum untuk melihat visualisasi desain dan progres IKN. Jadi kami sediakan CCTV-nya, kami sediakan data berupa desain melalui BIM, kemudian progresnya dapat diakses melalui *command center* ini.

Oleh karena itu, karena kebutuhan sudah semakin meningkat maka kebutuhan *bandwidth*-nya juga sejalan dengan pesatnya permintaan atau akses terhadap data ini. Kemudian portal data bencana yang terdampak dalam infrastruktur PUPR ini seperti tadi kami memiliki Sitaba, sistem informasi bencana yang dengan cepat bisa mendeliniasi infrastruktur-infrastruktur mana saja yang kemungkinan akan terdampak apabila terjadi bencana, sebagaimana yang datanya kami dapatkan dari BMKG.

Ibu-Bapak, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Khusus *command center* IKN, PUPR telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional di Amerika. Indonesia diwakili oleh dua, satu oleh PUPR sementara dari unsur yang lain adalah Telkomsel. Dan *alhamdulillah*, kami mengirimkan anak muda untuk menerima langsung penghargaan tersebut di

Amerika karena memang kami dorong agar yang muda-muda untuk melakukan proses-proses percepatannya.

Untuk portal *open data*, ini diakses dapat diakses. Jadi kalau dulu mungkin akses data sangat sulit tapi kami siapkan agar dengan *platform open data* ini maka para pengguna, para *stakeholder* kita dapat melakukan akses dengan cara seperti itu maka pertukaran data jauh lebih bisa kita lakukan. Portal bantuan pemerintah sebagaimana tadi kami laporkan, ini untuk memberikan informasi terkait usulan dari Pemda dan masyarakat yang dapat diakses oleh publik. Inilah yang menjadi satu indikator *output* yang harus diselesaikan oleh PUPR berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan bersama-sama dengan teman-teman di KPK. Kemudian untuk *e-pusaka* ini sistem yang dikembangkan untuk menelusuri pergerakan penyelesaian kebijakan PUPR khususnya kebijakan Bapak Menteri yang diarahkan untuk dilaksanakan oleh para Eselon I terkait.

Bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikian laporan kami, mudah-mudahan ini dapat memberi tambahan informasi baru dan dengan demikian juga kami sampaikan ke hadapan Ibu-Bapak semua untuk mendapatkan arahan.

Terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Terima kasih pada Pak Sekjen.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Irjen, mungkin Pak Irjen singkat-singkat saja, Pak ya.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. T. ISKANDAR, M.T.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat dan kami hormati Bapak Pimpinan Komisi V,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Sesuai dengan undangan rapat dengar pendapat yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal tentang kegiatan alokasi anggaran perkiraan alokasi anggaran tahun 2024. Sesuai dengan tema RKP Tahun Anggaran 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pengawasan *intern* dengan fokus pada tiga hal yang akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan program pengawasan tahun anggaran 2024 yaitu:

1. Adalah pengawalan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap kegiatan direktif dan prioritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024, antara lain: Pengawasan PSN, pengawasan PN dan pengawasan kegiatan IKN termasuk P3DN penyelesaian program tahun anggaran 2020-2024. Rehab rekon akibat bencana dan pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2024;

2. Adalah pengawalan penatausahaan barang milik negara di Kementerian PUPR dengan tema pengawasan perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR termasuk pengawasan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengolahan barang milik negara di Kementerian PUPR.

3. Adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik melalui, pengawasan atas penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Objek pengawasan Tahun Anggaran 2024 yaitu terhadap pengelolaan anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 sebesar 146,98 triliun yang dikelola oleh 10 unit organisasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 186 UPT atau balai pada 694 satuan kerja dan 2.252 PPK, serta lebih kurang 2.200 kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. Di mana jumlah kegiatan kontraktual perkiraan sebanyak 9.938 dan kegiatan swakelola lebih kurang 19.114 kegiatan.

Pengawasan dilakukan oleh auditor dilakukan sebanyak 194 orang. Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah sebesar 91,23 miliar lebih tinggi sebesar 967.000.000 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan belanja pegawai untuk penyesuaian tunjangan kinerja pada pejabat fungsional auditor berupa, kenaikan *grade* jabatan dan penyesuaian tunjangan kinerja bagi PNS formasi tahun 2022 yang sudah diangkat menjadi pejabat fungsional auditor.

Kronologi anggaran tahun 2024 yaitu kebutuhan anggaran dalam berencana strategis Inspektorat Jenderal untuk tahun 2024 adalah sebesar 136,4 miliar. Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, hal:

Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2024 dan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyampaian rencana kerja dan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 91,23 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pengawasan *intern* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kegiatan dukungan manajemen bidang pengawasan dan kegiatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati,

Nilai pagu anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 91,23 miliar dengan penjelasan anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut: belanja pegawai dan belanja barang sebesar 89,43 miliar yang terdiri dari belanja gaji tunjangan pegawai sebesar 44,24 miliar, belanja barang sebesar 45,19 miliar, anggaran pengawasan *intern* 35,49 untuk pelaksanaan audit *review* evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Termasuk di dalamnya hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kegiatan pengelolaan pengawasan *intern* dan 9,7 miliar digunakan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana kantor. Belanja modal sebesar 1,8 miliar digunakan untuk peningkatan prasarana perkantoran.

Selanjutnya, untuk pengelompokan indikasi kebutuhan anggaran kegiatan pengawasan *intern* tahun 2024 secara konkrit dilaksanakan untuk, pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu sebesar 11,73 miliar. Pelaksanaan *review* anggaran lain berupa *review* laporan keuangan, usulan rencana BMN, usulan RKA K/L, usulan revisi anggaran, usulan kontrak tahu jamak, usulan penggunaan anggaran dan penanganan bencana alam dan *review* lainnya sebesar 1,3 miliar.

Pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi internal reformasi birokrasi, evaluasi internal usulan zona integritas WBK dan WBBM, evaluasi efektivitas penerapan resiko, evaluasi maturitas penyelenggaraan SPP dan evaluasi lainnya sebesar 562 juta. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal, serta pemantauan lainnya berdasarkan perintah Menteri PUPR dan permintaan unit organisasi sebesar 600 juta. Pelaksanaan pengawasan lainnya berupa pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, sosialisasi bidang pengawasan dan koordinasi pengawasan sebesar 2,35 miliar.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib tingkat kementerian, antara lain: *review* laporan keuangan kementerian, *review* laporan kinerja kementerian, *review* usulan perubahan RKBMN kementerian, *review* pelaksanaan reformasi birokrasi, *review* tindak lanjut BPK atas penatausahaan BMN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 810 juta. Kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan *intern* PUPR sebesar

2,63 miliar, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan di Inspektorat Jenderal dalam bentuk Diklat sertifikasi profesional jabatan fungsional, sosialisasi bidang pengawasan dan *workshop* bidang pengawasan sebesar 6,2 miliar.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan dukungan pengawasan berupa perencanaan monitoring evaluasi kegiatan pengawasan sebesar 93 miliar. Tadi kami ulangi, ada kenaikan di Inspektorat Jenderal dibandingkan tahun 2023 senilai lebih kurang 967 juta, ini disebabkan oleh karena ada penyesuaian terhadap tunjangan kinerja dari pegawai yang belum mendapatkan jabatan fungsional dan sekarang sudah diangkat sebagai pejabat fungsional auditor dan ada penyesuaian *grade* dari pada jabatan di beberapa ASN yang ada.

Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon kiranya Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota kiranya dapat memberikan arahan lebih lanjut dan masukkan-masukan di dalam kegiatan. Demikian.

*Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Terima kasih, Pak Irjen, atas paparannya.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Kepala BPSDM dan terakhir nanti Kepala BPIW Kementerian PUPR.

Silakan, Pak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. H. KHALAWI. AH, MSC. MM):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati dan banggakan, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Kepala BPIW dan teman-teman PUPR serta hadirin yang saya muliakan,

Izinkan saya menyampaikan rencana lokasi anggaran menurut fungsi dan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR APBN tahun 2024. Berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU 0101-MN/1138, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penyesuaian Pagu Indikatif

Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024. Pagu BPSDM tahun 2024 adalah sebesar Rp425.138.972.000.00.

Pagu BPSDM tahun 2024 terdiri dari program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 100 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan vokasi Politeknik PU. Dan pagu program dukungan manajemen sebesar 325,14 miliar, meliputi pemenuhan operasional, pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah, serta pengembangan talenta. Transformasi digital *learning* meliputi penguatan sistem dan dukungan teknologi pembelajaran serta dukungan manajemen internal yang meliputi penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, perencanaan dan penganggaran monitor evaluasi serta kerja sama institusi dalam dan luar negeri.

Adapun komposisi pagu per jenis belanja terdiri dari alokasi belanja oprasional sebesar 164,49 miliar, yang digunakan untuk belanja gaji tunjangan dan operasional perkantoran, serta belanja non operasional sebesar 260,64 miliar untuk membiayai pelaksanaan kegiatan utama BPSDM.

Rancangan target kegiatan utama BPSDM tahun 2024, meliputi pengembangan talenta yang terdiri dari kegiatan asesmen dengan target 4.000 orang. Kemudian pemantauan kinerja dengan target 97 orang 7% dan pemetaan karir *coaching* mentoring dan konseling CNC dengan target 400 orang. Kemudian pendidikan magister super spesialis, kita ada 9 perguruan tinggi dan S1 Uncen serta D4 STAN dengan target 521 orang. Kemudian pendidikan vokasi Politeknik PU dengan target 856 orang dan pembekalan karya siswa, monitoring dan evaluasi untuk program LPDP dan lainnya.

Untuk program LPDP, kami sejak tahun 2022 sudah sangat meningkat targetnya dari biasanya 6 sampai 7 orang setahun sudah sampai 80 orang per tahun. insyaallah, tahun ini bisa 100 orang sebagaimana yang diarahkan... arahan dari Bapak Menteri. Kemudian pelatihan-pelatihan dengan target 8.021 orang meliputi pelatihan bidang sumber daya air dengan target 900 orang, pelatihan bidang permukiman dengan target 1.380 orang, pelatihan bidang jalan jembatan dengan target 1.176 orang, pelatihan bidang perumahan dengan target 370 orang, pelatihan bidang pengembangan infrastruktur wilayah 340 orang, pelatihan bidang manajemen konstruksi 1.080 orang, serta pelatihan bidang manajemen umum dengan target 2.775 orang.

Adapun rincian kegiatan BPSDM non operasional pada tahun 2024 sebagai berikut: Kegiatan pengembangan talenta yang dilaksanakan melalui pusat pengembangan talenta dan Balai Penilaian kompetensi meliputi *assessment*, pemantauan kinerja, pemetaan karir CNC dan kebijakan teknis pengembangan talenta dan kepatuhan internal dengan total pagu sebesar 19,42 miliar. Kemudian kegiatan pendidikan vokasi yang dilaksanakan melalui Politeknik PU, meliputi kerja sama dan tata kelola pendidikan Diploma III vokasi, penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat sebesar total pagu 100 miliar.

Kegiatan pengembangan kompetensi bidang SDA dan permukiman yang dirasakan melalui pusat pengembangan kompetensi SDA dan permukiman serta balai pengembangan kompetensi wilayah, meliputi: penyusunan kurikulum dan modul kebijakan NSPK, pengembangan kompetensi magister super spesialis dan pelaksanaan pelatihan serta sertifikasi dengan pagu total sebesar 92,11 miliar.

Kegiatan pengembangan kompetensi bidang jalan, jembatan, perumahan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan melalui pusat pengembangan kompetensi jalan, perumahan dan PIW, serta balai pengembangan kompetensi wilayah meliputi penyusunan kurikulum dan modul, kemudian kebijakan yang NSPK pengembangan kompetensi, magister super spesialis dan pelaksanaan pelatihan serta sertifikasi, dengan pagu total sebesar 19,77 miliar.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi bidang manajemen yang dilaksanakan melalui pusat pengembangan kompetensi manajemen dan balai pengembangan kompetensi wilayah, ini meliputi penyusunan kurikulum dan modul kebijakan NSPK, pengembangan kompetensi, magister super spesialis non teknis dan pelaksanaan pelatihan setiap sertifikasi dengan pagu total sebesar 41,9 miliar.

Terakhir adalah kegiatan dukungan manajemen pengembangan SDM yang dirasakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM meliputi pembekalan karyasiswa LPDP, perkuatan kelembagaan, perencanaan program, penganggaran, monitoring evaluasi data dan informasi, pelayanan internal, reformasi birokrasi, operasional dan pemeliharaan aset sebesar 49,12 miliar. Kemudian rekapitulasi pagu BPSDM tahun 2024 sebesar 425,14 miliar dengan rincian pagu persatuan kerja sebagaimana terlampir yang kami laporkan.

Terima kasih.

Selanjutnya, kami mohon arahan Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Silakan, Pak.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI (DR. IR. YUDHA MEDIAWAN, M.DEV.PLG):**

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI dan para Anggota Komisi V DPR RI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam kebajikan dan *shalom*.

Pertama-tama, izinkan kami dari BPIW untuk melaporkan hal beberapa hal sesuai dengan topik rapat dengar pendapat pada hari ini yaitu alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran BPIW tahun 2024. Sebelumnya, kami menyampaikan kembali tugas dan fungsi utama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berdasarkan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020, dimana BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah.

Terkait penjabaran tugas ini, Bapak Menteri dalam berbagai kesempatan menegaskan kepada BPIW untuk berperan sebagai penjuror program infrastruktur PUPR dengan menggunakan pendekatan berbasis pengembangan wilayah. Selain itu, ada beberapa penugasan dari Bapak Menteri yang diberikan kepada BPIW antara lain: integrasi penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting, serta percepatan peningkatan infrastruktur di kawasan industri strategis.

Sebagaimana unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR menjabarkan program 2024 sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dimana Kementerian PUPR melaksanakan prioritas nasional atau PN 2 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan manajemen pemerataan, menjamin pemerataan dan PN 5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Program 2024 BPIW turut mendukung hal tersebut.

Bentuk dukungan BPIW terhadap PN 2 antara lain berupa kegiatan terkait rencana pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah dan pelaksanaan sinkronisasi program tahunan sedangkan dukungan terhadap PN 5 antara lain berupa kegiatan evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PUPR yang terbangun dan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*.

Berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU 0101/1138 tanggal 24 Mei 2023, hal: Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024, BPIW mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 141,6 miliar. Dan selanjutnya berdasarkan surat Menteri PUPR Nomor KU 0101/1721 tanggal 15 Agustus 2023, hal: Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2024, BPIW mendapat alokasi pagu anggaran sebesar 142,33 miliar. Kenaikan sebesar 725,5 juta ini dikarenakan adanya penyesuaian besaran alokasi

pinjaman luar negeri untuk kegiatan *Integrated Tourism Development Project* atau yang kita sebut ITDP.

Dalam postur pagu anggaran 2024, terdapat alokasi belanja pegawai sebesar 31,62 miliar antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja dari 199 PNS BPIW. Sementara untuk lokasi belanja barang terdiri dari belanja barang operasional sebesar 21 miliar dan belanja barang non operasional BPIW sebesar 87,61 miliar, termasuk di dalamnya adalah porsi pagu pinjaman luar negeri PLN sebesar 13,52 miliar untuk melaksanakan kegiatan NUDP sebesar 4,52 miliar, sementara ITDP sebesar 9 miliar. Belanja modal sebesar 2 miliar untuk pemenuhan kebutuhan belanja dukungan peralatan kantor BPIW.

Terkait perencanaan kegiatan BPIW tahun 2024, kami membagi dalam lima kluster berdasarkan fungsi utama BPIW. Kluster pertama adalah perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR, dimana tahun 2024 BPIW akan melaksanakan beberapa kegiatan prioritas dengan anggaran 31,82 miliar di antaranya: perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR dalam mendukung penataan kawasan-kawasan strategis prioritas sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPIW provinsi yang telah selesai disusun pada tahun 2022.

Kemudian kebijakan teknis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah sebagai dukungan bidang PUPR terhadap RPJM 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, rencana strategis Kementerian PUPR 2025-2029. Kemudian penyelesaian kegiatan yang bersumber dari pembiayaan PHLN mendukung sektor pariwisata dan penanganan isu perkotaan yaitu *loan* ITDP dan NUDP. Kemudian juga Studio Geo Infrastruktur atau SGI sebagai pusat pengolahan data spasial dalam mendukung perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah.

Terkait kluster pemrograman infrastruktur PUPR dan dengan alokasi sebesar 13,70 miliar, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah antara lain: menyusun *long list* rencana kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur PUPR tahunan untuk menyusun pengembangan masing-masing pulau.

Yang kedua, melakukan penajaman dan verifikasi mencakup tujuan dan deskripsi setiap kegiatan prioritas terkait dengan isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah dengan melibatkan unit organisasi teknis yaitu: SDA, Bina Marga, CK dan Perumahan. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR dalam bentuk Rakorbangwil dan penyusunan bahan konsultasi regional atau Konreg yang melibatkan K/L lain dan pemerintah daerah serta berikutnya adalah verifikasi data untuk keperluan integrasi program penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting* melalui survei kolaborasi serta koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting* melalui pembangunan infrastruktur PUPR.

Selanjutnya, kluster kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR yang memiliki alokasi kurang lebih 20 miliar. BPIW melaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR nasional dan wilayah;
2. Analisis kebermanfaatan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan menggunakan model analisis manfaat;
3. Telaah strategis pada kawasan-kawasan prioritas dalam penanganan isu strategis kewilayahan dengan 3 wilayah metropolitan; yang terakhir
4. Penyusunan laporan kinerja Kementerian PUPR.

Kemudian dalam hal fungsi BPIW terkait pelaksanaan dukungan manajemen internal tahun 2024, BPIW mengalokasikan anggaran sebesar 22,09 miliar untuk melaksanakan kegiatan antara lain: dukungan manajemen terkait kesekretariatan tata usaha, *programming*, kemudian laporan keuangan, laporan kinerja, fasilitas kepegawaian dan umum, pengelolaan BMN, layanan hukum serta kerja sama komunikasi publik dan layanan data dan informasi.

Yang kedua, peningkatan pemahaman manajemen resiko untuk memenuhi target 9 strategi pencegahan korupsi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR. Kemudian perencanaan zona integritas dan upaya peningkatan integritas serta pelaksanaan sistem manajemen kepatuhan yang berbasis ISO 37301:2021 dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016, serta partisipasi BPIW dalam *world water forum* yang ke-10 nanti di tahun 2024.

Kemudian kluster terakhir dalam mendukung pencapaian target sesuai dengan tugas BPIW terhadap alokasi anggaran sebesar 54,72 miliar untuk pemenuhan gaji dan operasional itu antara lain: pemenuhan gaji dan tunjangan bagi pegawai di lingkungan BPIW, penyediaan layanan perkantoran, gaji pegawai non PNS, barang persediaan, utilitas pemeliharaan ruangan, kendaraan dinas dan lain sebagainya, serta penyediaan peralatan kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Untuk target keluaran utama yang akan dihasilkan melalui alokasi pagu anggaran tahun 2024 di BPIW itu adalah:

1. Rencana pengembangan infrastruktur di 38 provinsi, berupa dokumennya adalah RPIW;
2. Rencana strategis Kementerian PU Renstra untuk 2025-2029, serta integrated tourism development program di 6 KSPN untuk penyusunan masterplan-nya dan juga untuk nasional urban development program di 13 kota dan 1 kawasan industri;

3. Program tahunan di 38 provinsi untuk penyusunan program rencana kerja dari K/L Kementerian PUPR. Dukungan integrasi penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting* di 25 lokus prioritas. Kemudian pemantauan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 38 provinsi. Telaah strategis di 3 kawasan prioritas serta yang terakhir adalah belanja pegawai untuk 159 orang PNS yang ada di BPIW.

Demikian laporan yang kami dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan dukungan dari Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI. Demikian yang dapat kami sampaikan.

*Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Terima kasih, Bapak Kepala BPIW.

Selanjutnya, di sini ada 10 penanya dari Anggota.

Yang pertama, kami persilakan Bapak Ali Mufthi, silakan, Pak. Selanjutnya siap-siap Bapak Tamanuri.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Sekjen dan seluruh jajarannya,
Bapak-Ibu semua yang saya hormati,

Terima kasih, Pak Pimpinan, atas waktunya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di luar konteks yang terpapar yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di dalam forum ini. Karena memang kalau sudah bicara angka dan target-target capaian sebagaimana yang dipresentasikan di depan kita semua, saya yakin itu berdasarkan kajian analisis dan pendalaman yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal PUPR beserta seluruh jajarannya. Oleh karena itu, saya menangkap itu *item-item* yang tercantum di dalam dokumen ini sesuatu yang baik yang perlu saya apresiasi.

Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, sesuatu yang baik itu akan betul-betul baik manakala tersambung secara signifikan terhadap kinerja di lapangan. Pak Sekjen membangun sistem, Pak Irjen ngawasi, ada HRD-nya namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Nah, oleh karena itu, yang ingin saya tekankan di sini Bapak Sekjen bahwa PUPR ini lembaga besar, institusi besar didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa. Hal yang perlu diperhatikan adalah produk dari sebuah sumber daya manusia itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya punya pandangan, saya punya pendapat struktur organisasi PUPR ini harus lebih bisa cepat di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, satu itu.

Yang kedua, saya punya pandangan dan punya pendapat apakah betul institusi PUPR ini sangat tertutup untuk merespon kepentingan publik. Saya ulangi lagi, apakah institusi PUPR ini itu tertutup untuk kepentingan publik? Pengertian tertutup begini, Pak. Ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat mereka mengatakan betapa susahnyanya ini, Pak Ali, kami mengkomunikasikan soal yang menjadi wilayah PUPR ini kepada institusi-institusi yang menjadi ruang menjadi tanggung jawab daripada lembaga ini ya.

Saya tidak kepingin misal begini oh ini kalau yang undang DPR cepet gitu ya, tapi kalau yang menyampaikan aspirasi masyarakat langsung itu ada persoalan-persoalan. Indikator bahwa institusi itu kredibel dan akurat di dalam membangun sistem manakala daya respon terhadap kepentingan publik itu direspon dengan cepat. Jadi ini..., ini..., ini pandangan saya dan kita mengharapkan PUPR ini karena langsung bersentuhan dengan masyarakat Indonesia, maka kecepatan merespon persoalan kerakyatan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang itu menjadi wilayah di kementerian ini yang itu berpuluh-puluh tahun tidak bisa diselesaikan. Dijamak saja tidak, direspon saja tidak, dilihat saja tidak, akibat dibiarkan begitu berlarut-larut, Bapak-Ibu sekalian, *impact*-nya itu adalah banjir, masyarakat tenggelam, rumah roboh dan semuanya dan semuanya... semuanya...semuanya.

Nah, oleh karena itu, saya punya pandangan, sistem satu yang dibangun oleh Pak Sekjen, SDM yang dibangun BPSDM dan pengawasan yang dibangun oleh Bapak ini Inspektorat, itu harus bersambung dalam rangka meningkatkan performa pegawai aparat daripada PUPR ini. Ke depan kami tidak ingin ada sebuah pandangan dari masyarakat bahwa ada keeksklusifan. Oke, kita tadi ada ada bahasa diksi inklusif...inklusif...inklusif itu terbuka, bisa diartikan terbuka pada siapapun boleh masuk di ruang untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Catatan yang itu saja, Pak Sekjen, Pak Kepala, Irjen dan sebagainya. Prinsipnya adalah bagaimana PUPR ini mampu mempercepat *responsibility*-nya terhadap persoalan-persoalan rakyat, sehingga persoalan yang terkait dengan itu bisa diselesaikan secara baik. Banjir, tenggelam, rumah roboh, apa...apa... itu kita setiap saat musim hujan selalu menyaksikan.

Terima kasih.

Kurang lebihnya mohon maaf.

*Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Kami persilakan kepada Bapak Tamanuri, dan siap-siap Bu Cen.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Pak Ketua yang terhormat, rekan-rekan Anggota DPR Komisi V, Yang saya banggakan Pak Sekjen, Pak Inspektur Jenderal, Pak Sumber Daya Manusia, Pak Inspektur Wilayah, dan Para Eselon II yang saya banggakan, Bapak-Ibu dan Saudara-Saudara sekalian,

Bahwa kebenaran ini, saya tidak terlalu fokus kepada angka-angka yang sudah disampaikan, akan tetapi saya hanya mendengarkan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Badan Inspektur Wilayah mengenai apa-apa yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Kepala Badan. Kalau saya menilik dari apa yang disampaikan kelihatannya Kepala Badan kita ini perahu kecil tapi muatan banyak, perahunya kecil tapi muatannya luar biasa, 38 provinsi 547 kabupaten sekian kecamatan, itu dibawah kerjaannya Pak Inspektur Wilayah.

Jadi, oleh karena itu, tentu kalau terlalu banyak seperti ini dengan kondisi keuangan Bapak, anggaran Bapak yang sangat-sangat terbatas maka tidak fokus ini. Jadi, semua pekerja itu hambar seperti kita membuang air di tengah di pinggir pantai tidak ada yang selesai. *Nah*, oleh karena itu, kalau saran saya *sih* kalau tidak menyalahi kelembagaan ya dikurangi lah tugas dan tanggung jawab itu ngambil yang fokus-fokus aja. *Nah*, jadi kita harapkan bisa mencapai sasaran. Salah satu contoh tadi yang Bapak sampaikan masalah *stunting*, orang yang tidak besar-besar itu. *Nah*, ini ya karena kami *nggak* di satuan 3 ya saya tidak bisa melihat apa yang Bapak kerjakan di situ. Saya 11 tahun jadi bupati tidak pernah saya melihat ada kegiatan sampai di bawah.

Nah, oleh karena itu, ini *stunting* ini *nggak* usah jauh-jauh lah kita berpikir, perbaikan gizi, kasih kesehatannya, lingkungannya baik. Jadi ini sudah mempengaruhi terhadap *stunting* ini, bukan ya, saya ya menindak kan dari PUPR mungkin infrastrukturnya tapi, ya jangan terlalu jauh gitu, saya rasa. Karena kalau terlalu banyak yang Bapak pikirkan, yang Bapak bikin programnya itu akhirnya hambar, *nggak* ada yang mencapai target.

Nah, oleh karena itu, harapan kita dari sekian banyak anggaran yang sudah yang kita ajukan untuk tahun 2024 kemudian evaluasi tahun 2022, harapan kita adalah ada di antaranya dari sekian banyak program Bapak itu

yang bisa dibuktikan. Kemudian, selain dari pada itu, saya akan menyampaikan kepada Pak Sekjen, Pak Inspektur, Pak Sumber Daya Manusia, ini berkaitan yang saya sampaikan, ini saya sudah dari zaman Pak Khalawi, saya menyampaikan. Saya tidak mungkin akan menyampaikan anggota Bapak kalau kira-kira saya masih ada..ada rasa baiknya.

Saya menyampaikan hal seperti itu Pak Khalawi dulu, waktu Bapak jadi Dirjen karena sudah *nggak* benar, saya sudah *nggak* bisa kerja sama dengan anak buah Bapak dibawah itu, begitu juga saya sampaikan kepada Bapak Sekjen karena saya tidak bisa lagi pembinaan dengan kawan-kawan itu. Jadi kalau ini diteruskan ya *nggak* usah saya buka lah, kondisinya. Ya, hubungan kami *nggak* harmonis, Pak, sedangkan kita ini untuk mencapai tujuan itu adalah adanya kerja sama yang harmonis, kan Bapak sering ngomong kan gitu tanpa hubungan yang harmonis tidak mungkin. Kalau saya maunya ke kiri dia maunya ke kanan baiknya di tengah-tengah jalanya, ini bukan, contoh saja contoh *real*.

Semua yang usulan-usulan yang orang-orang yang mau mendampingi di bawah itu kalau dari saya *nggak* ada dicoret semua, tapi kalau orang disamping diterima semua, ini kan *nggak* benar seperti ini...ini. Jangan tahan, Pak, semua yang sudah disusulkan DPR itu tentu ada pertimbangannya jangan ditahan-tahan lagi. Apalagi ini statusnya hanya sekedar Satker sedangkan Kepala Balai atau Kepala Balai Besar aja bisa kita pertimbangkan apa dia strukturnya hanya Satker.

Jadi saya berfikir siapa *sih* yang megang orang ini sampai berat betul Sekjen, Pak Dirjen, zaman Pak Khalawi *loh* bukan yang baru sampai bertahan sedemikian rupa. Saya sebetulnya *nggak* mau nyampaikan ini, Pak, tapi kita ini tinggal setahun lagi bubar, nanti *nggak* saya sampaikan saya kena penyakit jantung, *nggak* enak saya. *Nah*, kalau sudah sampai sini saya ketawa, Pak, terima kasih. Soal mau Bapak penuh atau tidak silakan, *nggak* ada urusan sama saya tapi saya sudah sampaikan.

Saya rasa demikian Pak Khalawi, teman saya ini.
Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya selanjutnya Ibu Cen, kemudian siap-siap nanti Bapak Hamka.
Silakan Bu Cen

F-PG (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,

Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Kepala Pak Khalawi, Pak Irjen, Pak Kepala BPIW,

Saya langsung ke Pak Sekjen. Pak Sekjen pemaparan Pak Menteri kemarin dengan anggaran 140 sekian itu masih juga menyisakan keresahan bagi kita. Mengapa? dengan anggaran itu padat karya kita yang kita harapkan bertambah malah berkurang tetapi *alhamdulillah* hasil rapat Raker kemarin disetujui, dimasukkan ke dalam kesimpulan agar bisa ditindaklanjuti tetapi bukan hanya padat karya, Pak Sekjen.

Kesempatan ini saya sampaikan juga kemarin saya sempat berbicara bahkan Rusun untuk Ponpes hilang di tahun depan, dengan anggaran perumahan 9 T, 50%-60% untuk kebutuhan IKN. Jadi saya rasa ke anggaran nanti untuk dari para Dirjen setiap 50% sekian itu kalau dialokasikan untuk IKN maka kebutuhan untuk masyarakat di luar IKN akan terganggu, salah satunya yang sudah saya dapatkan informasi Rusun. Jadi mohon Pak Sekjen sampaikan ke Pak Menteri karena kan sudah APBN sudah mau diketuk ya, harus ada pengakomodiran agar program-program untuk masyarakat di luar IKN harus diakomodir. Jangan karena kebutuhan IKN, yang lain dikorbankan. Kita harapkan selain dari padat karya yang seperti Rusun diadakan kembali. Mungkin itu titipan saya, Pak Sekjen, maaf di luar dari konteks yang disampaikan Pak Sekjen.

Yang kedua, ke Pak Kepala BPIW, Pak Yudha, Bapak kan di perencanaan pembiayaan ya. Jadi saya melihat ada pengembangan infrastruktur di 38 provi. Mungkin ke depan harus di-*breakdown* di mana saja dan apa saja supaya kita mengerti. Karena kalau apa penataan kawasan kan kita harus berkonsultasi juga dengan Bapak, benar.

Saya sudah pernah mengajukan perencanaan untuk penataan kawasan di Lingga, penataan kawasan peninggalan raja-raja, peninggalan bersejarah sampai sekarang *nggak* tahu bagaimana hasilnya, *nggak* pernah ada penjelasan ke saya.

Jadi mohon dipertimbangkan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus mengajukan dengan permohonan baru dan mohon itu diakomodir.

Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih semua, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Selanjutnya, Bapak Hamka silakan Pak.
Kemudian nanti siap-siap Ibu Estu ya, setelah ini.

F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS.):

Makasih, Pimpinan.

Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Irjen dan kawan-kawan yang lain,

Singkat saja, Pak Sekjen saja. Kita tahu, bahwa Undang-Undang Arsitek kemarin itu kami sudah selesaikan di sini, Pak Sekjen. Selama selesai undang-undang itu, belum pernah saya lihat Pak Sekjen menganggarkan untuk sosialisasi undang-undang tersebut, apalagi membuat peraturan turunannya, belum sampai sekarang.

Oleh karena itu, saya sarankan untuk bisa dianggarkan sosialisasi baik kepada Undang-Undang Arsitek maupun kepada Inpres jalan dan Undang-Undang Jalan, ini belum pernah kita lakukan sehingga kemarin tidak ada lah dengan keluarnya Inpres itu semua tidak paham. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat dan sebagainya.

Itu saja yang ingin saya sampaikan yang saya tunjukkan ke Pak Sekjen.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam.

Selanjutnya Ibu Restu, silakan Ibu Restu.
Kemudian nanti bersiap-siap Ibu Irine, setelah ini.

F-PDI PERJUANGAN (HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM dan juga Kepala BPIW yang saya hormati beserta jajarannya,

Saya ke Pak Sekjen dulu *deh*. Pak Sekjen beberapa waktu yang lalu ada informasi gempa dari BMKG, gempa di Tanah Bumbu dengan kekuatan 7,4 skala richter. Coba ini benar atautah tidak benar info ini? ini karena langsung dari BMKG. Kenapa saya tanyakan ini? karena kita sedang membangun IKN. Kalau Kalimantan Tanah Bumbu itu ikut mana *sih*? Kalimantan Selatan bukan ya. Kalau Kalimantan terkena gempa dengan kekuatan 7,4 skala *richter* artinya Kalimantan tidak aman terhadap gempa, coba nanti dicek lagi. Saya juga ada

ke khawatiran BMKG ini salah menginformasikan, karena pada waktu itu terjadi 2 gempa, satu di NTB. *Nah*, saya tidak ingin ini akan mengganggu dan apa ada rasa was-was terhadap masyarakat dan tentunya kami semuanya juga pasti akan berpikir Kalimantan pun tidak aman dari gempa.

Berikutnya kepada Pak Irjen. Pak Irjen tolong pengawasan ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena memang kegiatan di kementerian itu tidak sedikit, akan tetapi bukan berarti itu sebagai alasan keterbatasan personel dari Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap *project-project* yang ada. Karena kita semua tahu lah bahwa kontraktor sekarang tidak sedikit juga yang bekerja tidak sesuai dengan spek yang diberikan, karena mereka menawar dengan nilai serendah-rendahnya. Dan di Kementerian PU tidak ada keberanian untuk memenangkan mereka yang mempunyai nilai penawaran yang objektif, sehingga resiko kita adalah mendapatkan kualitas bangunan yang boleh dibilang sangat-sangat rendah dan tidak sedikit kontraktor tiba-tiba lari tidak melanjutkan pekerjaannya. Jadi saya ingin Pak Irjen benar-benar bisa apa namanya menjalankan tugas beratnya ini dengan sebaik-baiknya. Se-Indonesia Raya memang tidak sedikit akan tetapi ya ini adalah tugas Bapak.

Kemudian untuk BPIW, saya hanya ingin menanyakan terkait dengan keberlanjutan dari *project* yang untuk pembangunan di Selingkar Wilis. Ini sudah sampai mana dan daerah mana saja yang sudah di tangani? sudah dibangun ya? karena kami juga tentunya ingin agar dengan adanya *project* pembangunan Selingkar Wilis ini benar-benar bisa memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitarnya khususnya yang dilewati dari *project* tersebut.

Berikutnya untuk Kepala BPSDM Pak Khalawi, untuk pendidikan vokasi setara pendidikan Diploma III vokasi. Ini masyarakat kan tidak banyak, belum banyak yang tahu bahwa Kementerian PUPR ini ada sekolah yang setingkat diploma ini ya. Apakah selama ini sosialisasi terhadap masyarakat khususnya sekolah-sekolah, kalau di PUPR, BMKG ya, *eh sorry*, di Perhubungan BMKG itu mereka kan sudah tahu karena mereka ada apa namanya informasi langsung ke sekolah-sekolah berkaitan dengan sekolah apa namanya di apa namanya, itu ada ada yang mandiri, ada yang ikatan dinas ya, *nah* mereka tahu, tetapi untuk yang Kementerian PUPR ini kan masih terbatas. *Nah*, itu saya ingin tahu, sejauh ini seberapa besar masyarakat mengetahui bahwa di Kementerian PUPR ini ada pendidikan Diploma III vokasi ini. Kemudian pendidikan ini juga apakah sama dengan yang lain ada yang ikatan dinas dan ada yang mandiri ya, ataukah semuanya mandiri atau semuanya ikatan dinas karena ini adalah pendidikan kedinasan tentunya ya.

Dan mohon maaf satu lagi, beberapa waktu yang lalu saya ke Bromo, Pak. Bromo adalah salah satu prioritas untuk pembangunan kawasan pariwisata, akan tetapi di sana masih terlihat belum maksimal untuk penanganannya termasuk jalannya. Ini mohon kalau bisa ,jalan ini bisa sedikit dilebarkan, karena saya kira sangat bahaya itu kalau apa tidak dilebarkan, apalagi kalau malam, malam ini belum ada penerangan jalan sama sekali.

Nah, kemarin dengan Kementerian Perhubungan, saya sampaikan mohon kiranya untuk penerangan jalan bisa di apa dipasang, tetapi untuk yang PU yang sudah dibangun juga tolong itu bisa di apa dirawat betul dicek betul karena sudah membangun banyak apa bangunan-bangunan termasuk *home stay-home stay* itu kalau bisa apa dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana pengelolaan yang baik sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan apa sarana prasarana yang sudah sarana yang sudah disiapkan oleh kementerian begitu. Dan saya juga ingin tahu itu pengelolaannya diserahkan ke siapa? ke pemerintah daerah? atukah tetap Kementerian PUPR? atukah kepada desa setempat yang ketempatan bangunan tersebut.

Itu saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam.

Saya persilakan Bu Irine.
Kemudian selanjutnya siap-siap Bu Neng Eem.

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS, MCOMN&MEDIASST.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Pak Sekjen beserta jajaran yang saya hormati,

Saya hanya ingin menambahi Anggota lain. Saya tertarik dengan presentasi Bapak di transformasi di bidang pelayanan publik. Saya sangat mengapresiasi, Pak, mengenai visualisasi tersebut ini mulai dari SIGI-PUPR, *portal command center* IKN, Sitaba dan juga *open data* dan juga selamat tadi seperti yang Bapak sebutkan bahwa mendapatkan penghargaan ya untuk *command center*-nya.

Harapan saya tentu, Pak, pada *open data* ataupun program-program yang tadi saya sebutkan dalam bidang pelayanan publik ini Bapak mampu menepis saran dari Presiden ataupun masyarakat tentang banyaknya aplikasi pemerintah yang tidak berfungsi ataupun bermanfaat. Karena anggarannya ada dicurahkan di situ tetapi manfaat bagi masyarakatnya yang terkadang masih kurang.

h

Saya percaya, Pak, bahwa teknologi itu bisa atau mampu membantu kinerja kita. Apalagi tadi disebut kata inklusif, keterbukaan, dan juga saya pikir transparansi itu menjadi tiga kata kunci yang penting untuk kita aplikasikan. *Nah*, harapan saya aplikasi yang sudah dibangun, aplikasi yang sudah dibikin betul-betul mampu melayani publik.

Kalau saya bisa mungkin sedikit tambahkan, Pak, aplikasi yang selama ini menjadi daring ya oleh masyarakat menjadi kesukaan masyarakat adalah aplikasi yang dimiliki oleh BMKG. Tidak perlu PUPR memiliki aplikasi yang serupa tetapi kata kuncinya adalah bagaimana pemanfaatan dan pengetahuan publik untuk adanya aplikasi ataupun portal itu tersampaikan. Dan yang terutama adalah masyarakat tahu betul bagaimana mengoperasikannya, bagaimana menjalankannya. Karena saya pikir ini menjadi pintu gerbang untuk masyarakat betul-betul bisa juga mengakses informasi ataupun program dari PUPR. Jadi, mungkin itu, Pak, harapan saya navigasi dan cara portalnya itu bisa disosialisasikan kepada publik seluas mungkin, terutama *stakeholder* yang ada di daerah sehingga memang mereka bisa memantau juga terutama proses permintaan ataupun permohonan itu. itu saja Pak untuk Pak Sekjen.

Lalu tambahkan pendalaman untuk Kepala BPIW. Ini saya rasa Tupoksi BPIW ini sangat relevan, Pak, dengan kebutuhan Dapil saya, Maluku Utara ya. Maluku Utara itu provinsi dengan 1.000 lebih pulau dan merupakan wilayah 3T sekaligus BPIW ini juga menurut saya selain relevan dengan Dapil saya juga sangat relevan Tupoksinya dengan 3 provinsi baru yang ada di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah dan juga Papua Selatan.

Jadi, Pak, tadi disebutkan ya di *slide* nomor 3 itu adalah prioritas nasional yang relevan dengan BPIW adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini sangat relevan tentunya untuk daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, itu adalah kebutuhan dukungan untuk pengembangan infrastruktur wilayah. Pertanyaan saya, Pak, yang ingin saya dapatkan adalah penjelasan Kepala BPIW program apa, Pak, yang secara riil Bapak miliki atau Bapak susun, ini BPIW itu terkait dengan Maluku Utara dan 3 provinsi baru di Papua itu apa, Pak. Karena saya sangat yakin bahwa 3 provinsi baru ini Dapilnya Pak Harvey sebelah saya, *eh* wilayahnya Pak Harvey bukan Dapilnya Pak Harvey, Papua, tapi saya yakin juga teman-teman juga sepakat bahwa Indonesia Timur masih mengalami banyak, ya....

F-PD (WILLEM WANDIK):

Interupsi, Pak Ketua, interupsi, bukan 3 tapi 4.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS, MCOMN&MEDIASST.):

Oh, 4 maaf...maaf, terima kasih Pak Willem atas masukannya, 4 provinsi baru wilayahnya beliau, Pak ini Papua Barat juga ya, terima kasih. Jadi saya pikir 4 wilayah ya, Pak, ya 4 provinsi baru ini membutuhkan dukungan yang

h

sangat strategis dalam pengembangan wilayah. Dan Pak Kepala bahwa mentari terbitnya dari timur jadi harusnya perhatian untuk ke timur itu harus selalu lebih nyata.

Terima kasih, Pak, itu saja.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, terima kasih Ibu Irine.

Selanjutnya, Bu Neng Eem.
Kemudian setelah itu siap-siap Pak Harvey.
Silakan Bu Neng Eem.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):

Iya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo budaya.

Saya mendukung apa yang dia sampaikan Ibu Irine ya. Iya, kalau untuk Indonesia Timur apa *sih* yang *nggak* gitu kan pasti kita mendukung.

Langsung saja, Pak, beberapa kali kita melakukan rapat ya dengan Sekjen, Irjen, BPIW sama BPSDM dan beberapa kali juga saya sudah menyampaikan agar ada *dong* kegiatan yang bisa menyapa dilaksanakan di Dapil kita masing-masing. Nomenklaturnya silakan tema dan judulnya silakan ngikutin nomenklatur yang ada di tempatnya masing-masing, tapi minimal kita bisa ngumpul orang. Entah sosialisasi, entah seminar, entah kajian, entah apa gitu, Pak, kita minta dong, minimal tahun ini saja gitu *loh*. Pak ini diawali dengan permintaan permohonan *nih* ya ini untuk semua Dapil, Pak, tidak hanya untuk saya, saya meminta untuk semua Anggota Komisi V, Pak.

Karena ini belum ada selama saya bermitra dengan apa PUPR, dengan Bapak-Bapak ya. Pak Khalawi dulu waktu apa Dirjen Perumahan nyapa tapi selama menjadi apa BPSDM ini belum, Pak Sekjen juga belum ke Dapil saya, Pak Irjen juga belum apa Kepala BPIW-nya juga belum, *nah* ini Bapak harusnya nyapa keliling, Pak. Kalau Bapaknya *nggak* bisa sibuk, ya kegiatannya lah, *gitu* kan, kalau program yang itu yang *nggak* bisa minimal kegiatan sosialisasi *kek*, apa *kek*, seminar kayak, *gitu loh*. Iya *nggak*, setuju *nggak* teman-teman? setuju itu, Pak, seperti itu. Ya, *nggak* nomenklaturnya yang ada di tempat Bapak *nggak* perlu mengada-ngada seperti itu ya, itu yang pertama.

Terus yang kedua, saya ini langsung ke BPIW aja ya, ke BPIW ini memang isu yang sangat menarik dan strategis. Apalagi kalau saya membaca

lembar terakhir gitu ya rincian pagu Anggaran BPIW untuk tahun anggaran 2024 ini, Pak. Yang pertama, ada rencana pengembangan infrastruktur, infrastruktur di 38 provinsi. Terus kemudian ini ada ITDP di 6 KSPN ini, KSPN-nya itu di mana saja, 13 kota itu di mana saja, kami juga mohon informasinya.

Kemudian ada juga penanganan dukungan integrasi penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting* di 25 lokasi prioritas. Yang menjadi penanganan 25 lokasi prioritas itu di mana saja? kita mohon diberikan informasi, Pak. Terus juga kemudian ada untuk Monev ya, terkait pembangunan infrastruktur ada trans strategis di 3 kawasan prioritas, ini juga mohon kami diberikan informasi, Pak, yang terkait ini. Kalau memang itu ternyata provinsi kami yang ada Dapilnya kami itu juga ada di data itu, kan kita bisa bersinergi seperti itu, itu Pak.

Terus kemudian saya ingin berangkat dari Provinsi Jawa Barat dulu karena Dapil saya Jawa Barat III. Pengembangan infrastruktur wilayah itu juga kalau *nggak* salah pernah dipelajari terkait Jawa Barat bagian selatan. Itu sudah dibahas di provinsi, *nggak* tahu ini apakah sudah disinergikan dengan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah yang ada di Kementerian PUPR atau tidak. Karena kalau bicara Jawa Barat tentu ada *gap* yang cukup menganga antara Jawa Barat Bagian Utara dengan Jawa Barat Bagian Selatan. Jawa Barat Bagian Selatan apa, lokus-lokus *stunting*nya itu juga banyak. Dan apabila perlu kami sampaikan, jadi ada seorang guru, Pak, di Jawa Barat Bagian Selatan Cianjur Selatan itu ya. Dia kalau di saat musim hujan ketika dia berangkat ke sekolah untuk mengajar dia pakai motor tetapi ketika di saat musim hujan bukan dia yang menunggangi motor misalnya kalau pas pulangnyanya hujan tapi ini dia bingung caranya gimana caranya membawa motor dari tempat tersebut bahkan dipikul seperti itu. Itu adalah contoh saking jeleknya infrastruktur di Jawa Barat Bagian Selatan. Tetapi memang *alhamdulillah* kalau untuk jalan nasional sudah relatif bagus seperti itu tapi ini jalan-jalan masuknya itu yang mungkin saya pernah menyampaikan *alhamdulillah* juga yang dari Jakarta sampai kemudian ke Cibuli itu adalah desa yang *stunting* itu 9 jam dan *alhamdulillah* sekarang ada Inpres ya ada Inpres gitu kan. Itu kan kalau 9 jam itu berarti sama dari Jakarta ke Jawa Timur, Pak, seperti kalau naik apa lewat tol itu. *Nah*, hal-hal yang seperti itu juga mungkin mohon juga kami diinformasikan. Tentu saja, saya juga berharap Jawa Barat Bagian Selatan Itu juga masuk di dalam skema Bapak juga.

Terus kemudian kalau untuk Cianjur yang di puncak, saya berkali-kali ya karena sebenarnya kita pernah kunjungan dan kemudian bagaimana untuk mengurai kemacetan yang hampir 24 jam di puncak itu. Apalagi di saat sekarang, di saat bagaimana polusi di DKI di Jabodetabek begitu menggila gitu kan, orang akhirnya mencari udara segarnya rata-rata ke Puncak, sehingga Puncak menjadi macet. *Nah*, oleh karena itu, kayak perlu kajian strategis untuk mengurai itu infrastruktur yang seperti apa. Dan kemarin sempat juga waktu kita melakukan kunjungan spesifik bagaimana kemudian Tol Bocimi itu juga mungkin bisa masuk ke Gunung Mas. *Nah*, ini perkembangannya sejauhmana, apakah itu juga sudah masuk dalam skema di apa kajian BPIW menjadi

strategis atau tidak, gitu kan, sehingga biar kami tahu ini *tuh* akan menjadi prioritas atau *nggak* seperti itu, itu yang pertama.

Terus yang kedua bergeser ke yang sedikit agak timur yaitu Bali. Walaupun di sana Bali apa lebih relatif terkenal ya ketimbang Indonesia bahkan gitu kan tetapi ini ada juga *gap* antara Bali Selatan dan Bali Utara. Kalau di Jawa Barat yang utara lebih sejahtera, yang selatan tertinggal, kalau di Bali Utara sebaliknya di selatan sejahtera di utara agak tertinggal. Saya pernah mendengar beberapa skema-skema yang mungkin infrastruktur skala besar itu akan ada tol dan lain sebagainya. Bahkan sempat mendengar itu di media sosial itu, saya sempat dengar juga lihat di IG gitu bahkan akan ada tol dari Jawa Timur tembus sampai kemudian ke Bali terus bahkan sampai menembus laut dan nanti ke bawah laut dan nanti tol itu ada kaca katanya, sehingga yang di dalam tol itu bisa melihat ikan-ikan berenang gitu kan, bisa melihat apa dunia laut. Itu *nggak* tahu, Itu apa benar atau salah gitu kan. Apakah itu juga ada di dalam apa kajian BPIW atau tidak gitu kan tetapi memang masyarakat Bali Utara, kita pernah ke sana ketemu beberapa Plingsir, tokoh adat, tokoh agama, juga dari Udayana, mereka sebenarnya lebih membutuhkan apa konektivitas yang lebih cepat yaitu bandara udara tetapi ini kan wilayahnya bukan sini. Tetapi untuk sebuah kajian infrastruktur, saya kira tidak ada salahnya kemudian dimasukkan ke apa kajian strategis BPIW karena ini pernah masuk PSN juga seperti itu.

Dan terus kemudian yang terakhir, Pak, karena hasil-hasil kajian Bapak ini kan amat sangat strategis dan itu akan menjadi rujukan entah itu bagi kementerian pemangku kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, jangan lupa apa skema *indigenous* lokal kearifan lokalnya juga dimunculkan di situ dimasukkan. Contoh kecil misalkan ya contoh kecil, pasar lah ya pasar Jembrana, mungkin dalam pembangunan itu jangan kemudian disamakan dengan apa yang di Jakarta itu Tanah Abang yang mungkin ukurannya dua kali tiga. Tetapi kalau bagi mereka mungkin di Bali itu hal yang sangat sempit karena apa? bagi masyarakat Bali yang mayoritas adalah orang Hindu mereka di dalam ruangan itu harus ada kayak untuk dupa untuk ibadah itu, itu yang sudah menjadi keyakinan mereka, gitu kan, dan itu adalah luasnya sekitar 75 centimeter, kalau kemudian ada ornamennya hampir-hampir 1 meter menghabiskan itu. *Nah*, hal-hal yang kayak gitu tuh itu juga termasuk dalam hal pembangunan lain juga itu tolong dimasukkan apa masalah-masalah apa, kearifan, kearifan lokal. Termasuk juga di Bali ini untuk pembangunan yang kayak misalnya di bandara. Di Bandara Bali yang sekarang ada, Pak, kita mohon maaf mau sholat itu agak susah *nih*, Pak, termasuk di VIP ya, ini kan yang membangunnya kita pusat. Yang ke sana memang di Bali mayoritas adalah orang Hindu, tetapi yang datang ke Bali kan semua agama orang Islam juga banyak. Jadi tolong juga dalam pembangunan juga mungkin itu juga dilihat, apalagi yang sifatnya itu semua orang datang. Ke depan gitu kan kalau mau ada apa pembangunan dan lain sebagainya itu juga tolong diperhatikan hal-hal yang seperti itu gitu. Kearifan-kearifan lokal, keyakinan-keyakinan setiap apa yang yang perlu diakomodir dalam skema pembangunan infrastruktur.

Mungkin untuk sementara itu aja.

Terima kasih.

*Wallahul muaffiq ila aqwamit thoriq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Matur Suksma.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Harvey, kemudian nanti siap-siap Bapak Willem Wandik.

Silakan Pak Harvey.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang terhormat beserta Anggota Komisi V yang saya hormati, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Kepala BPSDM, Kepala BPIW yang saya hormati beserta jajarannya,

Saya sedikit saja, sebetulnya saya ingin membawa hal ini ke Dirjen Perumahan karena ini terkait masalah rumah khusus yang saya terima untuk masyarakat Suku Moi di Kota Sorong. Namun, barusan dari apa Kepala Balai Perumahan di Kota Sorong mengatakan, bahwa sebaiknya diinfokan kepada Pak Sekjen, bahwasanya perumahan khusus ini yang dikhususkan untuk Suku Moi ini masih menunggu, saya tanya progresnya bagaimana mereka masih menunggu arahan dari pusat, Pak.

Nah, jadi saya mohon perhatian dari Pak Sekjen kalau perlu diinformasikan ke Pak Dirjen Perumahan karena Suku Moi ini sudah sangat menantikan rumah khusus yang dijanjikan. Dan pada saat saya kemarin riset saya sudah bertemu dengan mereka sudah melihat lokasinya dan lain sebagainya beserta orang-orang dari PUPR.

Itu saja dari saya, Pak.

Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, selanjutnya kepada Pak Willem, silakan Pak Willem.
Kemudian nanti siap-siap setelah itu Pak Anwar Hafidz.
Silakan Pak Willem.

F-PD (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota Komisi V, dan Pak Sekjen, Irjen dan BPSDM, dan juga BPIW serta seluruh jajaran yang kami hormati,

Dari kami pertama untuk Sekretariat Jenderal terkait pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebesar 578 miliar. Meskipun turun dari pagu anggaran dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 591 miliar, namun kami berharap tidak mengurangi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Dan berikut kalau kita pelajari paparan yang disampaikan tadi sepertinya kami belum dapatkan tahun 2024 ini untuk kegiatan evaluasi rencana strategis kementerian tahun 2024 karena sudah dianggarkan penyusunan rencana strategi kementerian untuk di 2025-2029. Apakah evaluasi Renstra ini memang betul belum dianggarkan ataukah sudah dianggarkan tapi tidak muncul di paparan tadi. Karena menurut kami mestinya dilakukan evaluasi Renstra dulu baru dilakukan penyusunan Renstra atau dilakukan bersamaan.

Dan berikut kiranya ada tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah karena Inpres ini hanya sampai pada tahun 2024 saja, sebagai upaya mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024. Dan kemudian terkait dengan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah untuk kegiatan DAK fisik, kami berharap Sekjen bisa turun langsung ke daerah-daerah terutama seperti daerah bentukan baru seperti Maluku Utara yang disampaikan oleh sayap kanan kita tadi dan juga di Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan, Papua Tengah. Karena seringkali daerah, daerah kami di sana *tuh* sering abai dalam mengusulkan ini bukan karena mereka tidak mau tapi karena mereka tidak paham proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan DAK fisik tersebut.

Kemudian untuk BPSDM, kami melihat paparan tadi, kami lihat untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi 100 miliar, yang menurut kami menurut hemat kami itu sangat kecil sementara Indonesia sudah mimpi besar untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia emas. Untuk itu, memang dibutuhkan peran dari pemerintah yang kuat dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045. Karena itu, harapan kami program pendidikan pelatihan vokasi ini tentunya menjadi perhatian oleh pemerintah pusat terutama terkait bagaimana sudah diupayakan oleh pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pendidikan politeknik ya politeknik diploma di Semarang. Tentunya kami pada prinsipnya mendukung sangat mendukung untuk menciptakan dan generasi emas Indonesia untuk menuju atau menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka. Karena itu, harapan kami anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politeknik ini bisa ditambahkan, bisa ditingkatkan.

Dan selanjutnya untuk BPIW dan juga sekali lagi untuk BPIW dan juga Sekjen kiranya ke depannya kalau ada audiensi dari Dapil kami baik dari 4 DOB baru dan juga kabupaten setempat kalau mereka datang silaturahmi untuk minta peran dan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ternyata tidak sama penyusunan dokumen RT/RW secara komperhensif di daerah. Karena dengan demikian bisa daerah itu bisa ke bagian anggaran sedikit-sedikit mungkin 5, 10 atau mungkin 20 tahun ke depan, sehingga daerah itu bisa disiapkan infrastrukturnya dengan baik dalam rangka meningkatkan ketertinggalan.

Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami menyampaikan mohon maaf kalau ada salah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Ya, silakan Pak Anwar Hafidz.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
salam sejahtera buat kita sekalian.

Bapak Pimpinan dan sahabat Komisi V yang saya muliakan,
Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPIW dan seluruh jajaran Kementerian PUPR yang hadir pada kesempatan ini,

Yang pertama, Pak Sekjen, kalau saya melihat bahan-bahan pemaparan yang disampaikan ini, saya ingin mengajukan saran, Pak. kita ini membahas anggaran dari tahun ke tahun, kita ingin juga mengetahui sebetulnya capaian sampai tahun keempat RPJMN kita ini sudah sampai dimana karena sesungguhnya ukuran kinerja itu akan terpantau melalui laporan yang bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, mungkin kami butuh itu Pak Sekjen disampaikan sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Secara umum bahwa Kementerian PUPR sampai dengan tahun kerja 2023 ini kita sudah sampai di sini Pak, sehingga 2024 kita tentu akan memberikan dukungan, mengoreksi apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi prestasi yang sudah dicapai.

Kita setiap rapat, saya lihat pasti yang kita apresiasi adalah WTP. WTP itu saya kira hampir semua sekarang kementerian/lembaga daerah hampir semua sudah WTP. Karena WTP itu kan akuntabilitas kinerja pemerintahan di lihat baik dari tata keuangan dan sebagainya tapi belum tentu berdampak pada apa yang menjadi hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Nah, kita di sini dalam pengawasan politik kita bukan di situ sebetulnya bukan soal prestasi WTP dan sebagainya, WTP beratus kali tapi kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, kita bukan itu yang kita cari sebetulnya. Yang kita cari di sini adalah sejauhmana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini telah berdampak pada masyarakat.

Nah, oleh karena itu, mungkin Pak Sekjen, kami sangat butuh itu gambaran capaian pemerintah di periode kedua Bapak Presiden ini sampai dengan tahun kerja 2023 sudah sampai di mana, seperti progres-progres apa yang telah kita lakukan selama ini.

Di bidang perumahan misalnya, kita sudah sampai di mana, kemudian di bidang Bina Marga, di bidang sumber daya air dan sebagainya sudah sejauhmana kita menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat yang begitu banyak di negara ini. Jadi itu saran saya, saya tidak melihat apa yang disampaikan karena saya kira apa yang disampaikan lewat paparan ini tidak ada juga yang akan kita bisa kritisi di sini karena ini semua sistem secara administratif, tapi yang paling penting bagi saya adalah saya ingin melihat Pak Sekjen sejauhmana kira-kira capaian yang sudah kita capai dalam tahun terakhir RPJMN kita ini, itu yang pertama.

Demikian juga dari Pak Irjen saya kira dari kemarin saya sampaikan saya apresiasi Kementerian PUPR yang telah melakukan kerja dalam rangka melakukan tindak lanjut hasil temuan, ini kerjanya Pak Irjen ini. Karena pekerjaan paling susah itu kan, Pak, menindaklanjuti hasil temuan dan *alhamdulillah* saya tidak sampai 90% sudah terealisasi mulai dari tahun 2000 berapa itu saya lihat kemarin paparan Pak Menteri.

Nah, kemudian yang ketiga kepada Bapak Kepala Badan BPIP ini Pak BPIW. Saya lihat dalam Permen PUPR itu Nomor 3 Tahun 2019 bahwa BPIW ini melaksanakan tugasnya itu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur di Kementerian PUPR. Keterpaduan ini saya ingin menggarisbawahi soal keterpaduan, Pak.

Nah, dalam kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada Pak Sekjen perencanaan kita, saya ingin melihat beberapa hal, Pak. Ada daerah-daerah yang sudah ditetapkan di Indonesia ini sebagai kawasan strategis nasional. Saya ingin minta dari Bapak, kira-kira apa yang sudah Bapak lihat dari kawasan-kawasan strategis nasional di Indonesia ini dalam hubungannya dengan tugas Bapak melakukan perencanaan ya melakukan memberikan bahan dalam hal keterpaduan tadi perencanaan di dalam internal PUPR.

Contoh misalnya, Pak, saya ingin mengambil satu contoh kawasan strategis nasional yang sudah ditetapkan ada salah satu kawasan industri di Sulawesi Tengah, namanya PT Indonesia Morowali Industrial Park. Itu kawasan industri yang Pak Presiden banggakan di mana-mana. Dari tahun

2015 sampai 2022 ini telah menyumbang pajak kepada negara itu kurang lebih 570 triliun, ini Pak Presiden di mana-mana selalu sampaikan. Yang dulunya sebelum ada kawasan itu dari proses ini hanya bisa kita dapat sampai 33 triliun. Dengan proyek dengan program hilirisasi yang terjadi di sana itu bisa sampai 570 triliun, luar biasa, Pak, hasil yang telah disumbangkan oleh kawasan industri yang ada di sana itu. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak apa yang sudah disumbangkan oleh kawasan industri itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kawasan itu. Kalau Bapak lihat kawasan ini sangat kumuh, rakyat luar biasa, sistem *drainase*-nya, jalannya saja, Pak, itu kalau sehari-hari Bapak monitor lah itu pasti Kementerian PUPR monitor itu kan lewat jalan negara itu, Pak. Itu bisa sampai berjam-jam, Pak, karena 90.000 karyawan yang ada di situ, itu lewat semua di jalan nasional itu sampai dengan belum kawasan, Pak. Jalan-jalannya itu tidak ada yang teraspal, tidak ada *drainase*, belum TPA-nya tempat sampahnya, belum lagi sumber air baku yang ada di sana *tuh*. Saya ingin Bapak ini menyampaikan ini coba dilihat, Pak, kasihan ya kawasan industri yang sudah memberikan kontribusi bagi negara tapi negara tidak memberikan perhatian khusus masyarakat yang ada di sana.

Oleh karena itu, saya kira ini contoh salah satu, belum di kawasan kawasan strategi nasional lainnya yang sudah ada ini. Dari sudut tadi itu dari sudut Bina Marga, dari sudut sumber daya air, dari sudut pemukiman misalnya. Ini semua membutuhkan perhatian dan saya berharap banyak kepada Badan Pengembangan Wilayah ini bisa menjadikan salah satu prioritas, Pak, untuk bisa dipikirkan bagaimana kawasan-kawasan strategis nasional yang ada di Indonesia ini bisa menjadi perhatian, terutama masalah infrastruktur yang ada di kawasan-kawasan tersebut.

Saya kira ini saja, Pak, yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wallahul musta'an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, selanjutnya kepada Bapak Fauzi, kemudian nanti yang terakhir Bapak Sigit.

Silakan Pak Fauzi

F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua dan teman-teman Komisi V,
Bapak Sekjen, Irjen dan Bapak-Bapak apa lainnya dari Kementerian
PUPR,

Ada beberapa hal, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Restu ya, mengenai belum lama ini terjadi gempa ya di Kalimantan Timur. *Nah*, ini jujur saja saya pun cukup kaget, Pak, karena pada saat kita ke beberapa negara, Pak, ya termasuk kita kemarin kalau *nggak* salah ke Australia ya. Pada saat kita ditanya kenapa pilihannya Kalimantan Timur, gitu, IKN. Salah satu adalah IKN tidak ada gempa, Pak, *nah* tapi kenyataannya sekarang seperti ini, kalau itu benar ya, tapi yang mengeluarkan juga kan BMKG. *Nah*, saya ingin mungkin mengevaluasi ke belakang, Pak ya. Dulu kalau boleh sedikit diceritakan bagaimana mungkin ceritanya itu, Pak, kali BMKG menyampaikan itu di apa di pemerintah ya penentuan penempatan. Apakah BMKG hanya sekedar mengemas, mem-*branding* atau apa ya menjustifikasi ya harus di situ karena tahan tidak ada gempa gitu, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu, itu juga kita pengen tahu. Jangan sampai pindah ke sana juga tidak ada bedanya dengan Jakarta, gitu, itu yang pertama.

Yang kedua, saya setuju juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Eem paling tidak ya di tahun terakhir ini, Pak, ada program-program yang bisa di apa di *sharing* lah ya program disesuaikan dengan program yang sudah ada di tempat Bapak masing-masing, dalam rangka menambah elektoral kami di 2024. Kemudian ini untuk Pak Inspektur ini saya ingin menanyakan, Pak, apa urutan-urutannya mulai dari misalkan ada ada permasalahan atau ada aduan dari masyarakat atau dari Anggota DPR mengenai internal di pemerintahan terkhusus di Kementerian PUPR, mulai dari laporan sampai akhir itu kira-kira prosedurnya seperti apa, Pak, itu.

Berikutnya saya ingin bertanya kepada Sekjen ini penggunaan kata saja, Pak, tapi kadang-kadang kata membentuk persepsi kita. *Nah*, dari persepsi kita sudah pasti itu mempengaruhi respon kita, Pak. Misalkan saya sama Pak Sekjen, pada saat persepsi saya bagus pasti respon saya juga bagus sama Pak Sekjen itu, begitu juga sebaliknya.

Nah, saya, menurut saya judul daripada misalkan yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahan informasi, ini informasi persepsi saya agak kurang tepat ini, Pak. Karena kalau informasi kan informasi *ndak* perlu dibahas gitu. Jadi sementara saya baru mungkin saya baru temui gitu judulnya bahan informasi gitu, itu khawatirnya nanti persepsi kita ya, sekedar informasi, namanya informasi, gitu. Jadi kalau menurut saya kurang tepat penggunaan kata informasi itu karena khawatirnya persepsinya seperti persepsi umum, informasi itu ya hanya sekedar informasi, tidak perlu ada masukan, ada pembahasan dan pertanggungjawaban, itu.

Kemudian untuk SDM, saya juga ingin mengetahui ya sama dari rekan-rekan saya juga yang sudah bertanya sebelumnya mengenai pengembangan kompetensi sumber daya manusia pusat dan daerah, Pak. Saya ingin

mendapatkan gambaran atau informasi sejauhmana kira-kira apa tempat Bapak ini dalam mengaktualisasi kebutuhan sumber daya manusia dalam hal apa di Kementerian Perhubungan, Pak, dalam...kalau seandainya kita, kita sambungkan dengan program-program yang apa yang yang sudah jalan selama ini. Karena harapannya kan harapannya paling tidak ruang-ruang tenaga kerja itu ruang-ruang kerja yang digulirkan oleh kementerian ini bisa diisi oleh tenaga kerja lokal atau tenaga paling tidak tenaga kerja Indonesia lah, kita minimalis lah tenaga kerja dari asing itu, Pak.

Yang terakhir untuk apa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Saya setuju, Pak, dengan apa yang dikatakan Pak Anwar Hafidz ya, kadang-kadang perencanaan itu tidak sesuai dengan apa sasaran atau target yang diinginkan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah mencanangkan bagaimana penanganan di daerah terpencil gitu. *Nah*, ini mungkin enak didengar gitu karena kadang-kadang belum maksimal, Pak. Untuk itu ke depan hal-hal yang menjadi sasaran dan target itu harus di...harus di...harus masuk atau harus disesuaikan dengan apa antara perencanaan dan target, Pak.

Yang terakhir, saya juga ingin mengetahui ini apakah infrastruktur ini mempunyai kontribusi terhadap masalah yang sedang lagi ramai ini apa ya El Nino itu. *Nah*, kalau memang ada bagaimana meminimalisir itu, gitu, ini mungkin Litbang PUPR ini kalau sekarang ada di mana itu ada di kita kalau *nggak* salah, Pak, ya. Kalau memang bisa dibuat apa apa pendalaman tentang hal ini, saya pikir ini bisa paling tidak Kementerian dan Komisi V ini bisa berkontribusi lah karena sudah mengkhawatirkan iklim yang ada di negara kita ini.

Yang satu lagi mengenai ini, saya setuju juga yang saya sampaikan teman-teman. Saya pikir memang semakin lama semakin minim sekali data yang kami terima dalam hal RDP-RDP gitu. Kayak sekarang ini lebih banyaknya kita secara global saja, secara spesifiknya kita makin lama makin berkurang, Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan ke depan di rapat yang akan datang pendalamannya data-data itu bisa kami dapati, gitu. Karena kalau ada yang berhubungan dengan kita punya Dapil, itu paling tidak kita sampaikan ke apa...apa berani menyampaikan ke mereka gitu, kan kita juga punya data.

Saya pikir itu, Pak Ketua.

Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam.

Makasih Pak Fauzi.

Saya persilakan kepada Pak Sigit dan ini ada lagi tambahan ini, Pak Sekjen, yang terakhir dari Pak Syarif nanti.

Silakan Pak Sigit.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Sekjen dan seluruh jajaran Kementerian PUPR,

Saya tidak bertanya untuk satu ini apakah Sekjen, apa BPSDM atau BPIW atau Pak Irjen, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada kasus dan banyak kasusnya yang itu mungkin membutuhkan perhatian Bapak-Bapak semua yang hadir di sini. Saya hampir tiap pekan itu lewat jalan tol, beberapa kali saya melewati jalan tol yang baru dibangun di Cisumdawu tapi sering saya lewat jalan tol di Cipali-Pejagan sampai Semarang. Bapak-Bapak ada 2.760 kilometer panjang jalan tol yang telah dibangun oleh pemerintah tetapi sayang sekali kualitasnya memprihatinkan, tidak semua kualitasnya memprihatinkan, tidak semua saya katakan, tetapi Cisumdawu sangat memprihatinkan menurut saya.

Ada 4 kali jalan itu melewati sungai dan kemudian terjadi apa lompatan, lonjakan jadi tidak rata begitu, jadi lompat begini empat kali melewati sungai seperti itu. Sementara penerangan jalan, saya tidak pernah lewat malam hari, saya duga malam hari pasti gelap gulita, ini apa tidak membahayakan gitu. Sudah kita sampaikan ya tentu kepada Dirjen Bina Marga atau kepada BPJT ini ya. Tetapi yang ada di hadapan kami sekarang adalah Bapak Kepala BPSDM ya, sumber daya manusia ada anggarannya untuk meningkatkan kualitas *engineer* yang Bapak miliki untuk pengawasan.

Saya berhadapan dengan Pak Irjen yang akan melakukan pengawasan. Kalau Irjen PUPR melakukan pengawasan, asumsi saya bukan hanya pengawasan dalam bab manajemen keuangan tetapi termasuk di antaranya adalah kualitas dari bangunan-bangunan atau infrastruktur yang dibangun oleh *stakeholder* di Kementerian PUPR. Karena di materinya Pak Inspektorat Jenderal halaman 3 kegiatan 2 itu ada kalimat: "*pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR*". Saya kira bukan hanya manajemen keuangan tetapi kualitas jalan itu jadi pertimbangan. Dan sekarang *backbone* jalan itu adalah jalan tol terus kualitas tol yang seperti itu membahayakan manusia dan sebetulnya baru dibuka kalau *nggak* salah sudah dua kali kecelakaan baru dibuka Cisumdawu itu. Pak Sekjen, apakah ini tidak bisa dikoordinasikan ini kan itu tanggung jawab kementerian, tanggung jawab Pak Menteri, lah Pak Sekjen, Pak BPSDM, Pak Irjen itu kan membantu menteri, iya. Ini kalau kita mau mempermasalahkan, pasti kontraktornya tetapi kontraktor itu kan ada pengawas, terus ada pemerintah yang memberi LMAN untuk apa namanya pembebasan lahannya ya kan, akhirnya di mana tanggung

jawab kita ini, dan ini dibiarkan seakan-akan sudah selesai Cisumdawu ini berbahaya, Pak.

Saya laporkan di sini nanti saat saya bertemu dengan Dirjen Bina Marga, saya juga akan sampaikan dengan BPJT, saya akan sampaikan. Cuma ini penting, kenapa? jangan-jangan rasio jumlah insinyur jalan itu jauh lebih kecil daripada jumlah jalan yang dibangun, sehingga *nggak* ada orang sempat ada insinyur jalan sipil yang berkualitas yang ngecek jalan seperti ini. Di sini, di BPSDM ada pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah total anggarannya 325 miliar, ya, ada program dukungan itu 1, 2, 3, 4, 5, salah satunya yang nomor 2 adalah pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah. *Mbok*, ya di sekolah kan yang agak banyak gitu, Pak, ke luar negeri SDM-SDM sipil ini, Pak. SDM Arsitek saja sekarang kalau tidak kita sertifikasi dia bukan arsitek, Pak, cuma Insinyur biasa. Kalau Arsitek itu *certificated*, Pak ya. Jadi Bapak harus menyekolahkan arsitek yang ada di Kementerian PU, agar dia punya sertifikat, sehingga dia bisa mengawasi pekerjaan-pekerjaan arsitektural, demikian juga sipil, saya kira begitu.

Bapak Sekjen, Pak SDM, Irjen dan seterusnya Pak BPIW. Pak BPIW, tol, Pak, itu kan Bapak yang mendesain yang menyambungkan dan seterusnya ini perlu ada tol dianalisa, diteliti di iya kan. *Wes* tol-nya seperti ini sudah jadi tahunnya tapi kualitasnya, Pak. Pertanyaan saya, apakah BPIW itu memikirkan tentang kualitas, teorinya memikirkan tentang kualitas tapi ini sudah terjadi dan seakan-akan *nggak* ada dan *nggak* ada perubahan sama sekali sejak diresmikan. Saya beberapa kali melewati, masa *nggak* ada komplain sama sekali ini kepada kontraktornya, kepada *developer*-nya, atau kepada BUJT-nya, ini kan uang negara ada masuk di situ, jangan-jangan merugikan negara. Demikian juga dengan Tol Cipali, setiap kita lewat selalu ada perbaikan, selalu ada perbaikan, ini merugikan merugikan pengguna. Kenapa? jalan yang dua apa dua ruas dua apa namanya itu ya itu ditutup satu sehingga tinggal satu macet, akhirnya macet sepanjang jalan.

Terus kemudian ada tulisan kecepatan maksimal 100 kilometer/jam ya kan, kita *nggak* boleh, ada kamera, *nggak* boleh melewati 100 kilometer /jam. *Lah* sepanjang beberapa jam itu kami kecepatannya cuma 40 kilometer /jam, Pak, wajar kalau begitu *lowong* kita ambil, kita ambil apa itu kredit poin ngebut 200 kilometer/jam gitu, akhirnya mobilnya mencepat gitu ya. Jalan yang cuma 700 kilometer, Pak, ditempuh selama paling cepat 9 jam berarti kan tidak sampai 100 kilometer /jam.

Jadi, Pak Kepala BPIW yang mendesain secara global interkoneksi jalan-jalan tol, Pak Irjen yang mengawasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Pak BPSDM yang menyekolahkan tenaga-tenaga di PUPR, ini cobalah bekerjasama, sesuaikan rasio insinyur. Kalau *nggak* salah sekarang anak-anak muda sudah jadi GM di jalan-jalan tol. Saya ketemu beberapa di antaranya baru lulus 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Karena apa? banyak kepakai *kok* dan jangan-jangan rasio itu memang tidak pernah dibuat, kalau ada minta tolong saya tunjukkan ada rasionya, Pak. Kami menjaga rasio

kecukupan insinyur dengan pembangunan jalan yang cepat-cepatan seperti sekarang ini.

Saya kira itu *unek-unek* saya kepada Pak Sekjen yang sangat baik kepada saya. Terima kasih, Pak Sekjen atas WA tukang urutnya, karena kaki saya memang lagi bermasalah. Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Ini tukang urutnya yang mana ini, Pak? ini Pak Sekjen harus kasih info ke kita, karena kita ini kan sering ke Dapil, kaki kita sering pegal-pegal ini, Pak Sekjen.

Yang terakhir ini silakan Pak Syarif.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, BPIW dan BPSDM beserta seluruh jajaran,

Yang pertama, saya mau juga tuh kalau ada tukang urut bisa dikirim oleh Pak Sekjen, pasti paten itu Pak Sigit.

Baik, Pak. Jadi tadi saya kira sudah banyak teman-teman sebenarnya banyak juga yang ditanya seperti yang ditanyakan teman-teman tapi saya tidak akan mengulang hal itu.

Yang pertama berkaitan dengan kesekjenan. Saya kira memang saya ya mungkin ini mendapat keluhan juga dari pegawai-pegawai ya di dalam penanganan terhadap penilaian. Saya kira ini juga ya mungkin ini perlu juga menjadi perhatian. Ada juga keluhan, Pak, kita ini sudah bekerja baik tapi kadang-kadang baru ada intervensi udah tahu-tahu kita sudah dipindah, ketika tidak apa tidak apa mengakomodir dan apa-apa sebagainya itu. Sampai saya kira ini juga perlu menjadi perhatian dan memang itu saya lihat memang ada beberapa kali juga hal-hal itu, apakah juga kita tidak tahu dalam sisi penilaian tapi pada seharusnya kan harus ada tahapan-tahapan terhadap itu.

Yang kedua adalah Pak Irjen, saya kira setiap laporan kalau ada keberatan sebaiknya ditindaklanjuti. Kalau memang itu tidak memenuhi dibalas saja kepada yang bersangkutan. *Nah*, saya ada beberapa dari sana yang mengatakan bahwa kita ini, ini Pak, sebenarnya kita *ndak* ini ini ya dalam hal ini seharusnya kita ini harus ini tapi yang digunakan ini, saya sudah membuat keberatan tetapi sampai saat ini pun tidak ada tapi tidak lanjutnya. Ini saya kira ini harus juga hal-hal seperti ini supaya masyarakat tahu, ya kalau tidak ya

memang tidak memenuhi kriteria atau memang tidak ini dibalas aja gitu. Apakah itu juga sampai kepada Irjen ya saya tidak tahu juga, karena ada beberapa hal yang mereka memberikan data-data sampai tidak ada juga tidak lanjutnya hal-hal itu.

Kemudian berkaitan dengan masalah apa yang disampaikan tadi terhadap pengembangan infrastruktur kewilayahan ini keterkaitan terhadap ini, saya kira perlu sekarang itu. Saya mendengar juga IKN itu, Pak, ini kan keharusannya keterpaduan. Bahkan itu kalau bisa-bisa sambil 43 derajat katanya panasnya itu di sana. Saya ada berbicara dengan ahli ekologi waktu itu. Saya tanya kenapa ya, Pak, itu kan di sana dibawahnya kan batubara, ketika nanti ditebang hutannya itu *nah* itu ketika waktu-waktu tertentu bisa mencapai kepanasan ke tingkat kepanasannya sampai 40-an derajat, *wah* saya bilang bahaya juga, gitu. Bagaimana keterkaitan terhadap kajian itu, tentu bukan di Bapak tapi dalam rangka pengembangan ini saya kira harus menjadi perhatian ya memang hal-hal ini.

Kemudian berkaitan dengan...memang kalau kita lihat ini ini perlu juga pengkajian mungkin di apa di Kementerian PU. Perbandingan tol kita ini yang dengan yang lama itu *kok* beda sekali, Pak, seperti Jagorawi ya di kita saja lah ya Jagorawi, kemudian Jalan Soekarno Hatta, dengan tol-tol yang ada itu. Seperti kemarin saya ke Sumatera, aduh gelombangnya cukup ini juga padahal jalan tol ini kan bebas hambatan, termasuk beberapa ruas jalan tol yang ada di kita. Saya kira ini tentu harus menjadi suatu analisa terhadap hal itu di dalam pembangunan kualitas terhadap jalan tol itu sendiri, saya lihat memang hal-hal itu. Kemudian juga mungkin kualitas kita juga ya dengan apalagi kalau kita bandingkan dengan daerah negara-negara tetangga. Tetangga ini kan sebenarnya kultur tanahnya *ndak* terlalu jauh berbeda juga tapi kita di tol-tol di Malaysia dan sebagainya itu *kok* berbeda gitu dari sisi kualitas. Apa juga memang dari sisi terhadap anggarannya ya mungkin kita berbeda dengan mereka sehingga mempengaruhi terhadap kualitas. Ini.

Kemudian selain itu, sekarang daerah saya itu hampir setiap hari itu jalan daerah ke perbatasan itu jalan lintas Kalimantan itu, Pak, hampir setiap hari itu ya 2-3 hari sekali terjadi kecelakaan. Ini mungkin ke depan ya perlu juga dalam perencanaannya sehingga antara apa tikungan apa, bagaimana tikungan yang aman dan sebagainya ini kan perlu, perlu kajian juga ke depan kaitan dengan itu untuk meminimalisir terhadap kecelakaan-kecelakaan sebagaimana disampaikan oleh teman-teman. Karena kita sekarang ini kan sudah cukup canggih teknologi kita ini sudah bisa apa sudah bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sedetail mungkin berkaitan dengan itu ya. Saya kira para ahli-ahli kita ya bisa untuk melakukan hal itu ke depan, termasuk juga sudah harus direncanakan karena negara kita sekarang ini sudah tidak aman terhadap bencana terutama gempa. Ya, tadi Kaltim yang menurut kajian tapi memang saya dulu pernah diskusi katanya Kaltim itu ada kena sedikit ekor menurutnya ekor gempa. Jadi yang sebetul-betul bebas itu di Kalimantan *tuh* di tempat saya, Pak, sama Kalteng itu itu bebas, seharusnya ibukota dulu di Kalbar *tuh*, Pak, aman gitu.

Jadi saya kira itu saja, Pak, terima kasih atas perhatian.

Sekian.

*Wallahul muafiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam.

Jadi disini ada sekitar 13 lebih kurang lebih, Pak Sekjen, yang bertanya.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.
Boleh satu kalimat saja.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Boleh-boleh, cuma jangan lama-lama Bu ya, ini Pak Sekjen sebenarnya harus menghadiri pelantikan Eselon I.

Iya silakan.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Iya, satu aja.

Baik, terima kasih Pimpinan.

Langsung saja saya ingin ke Pak BPIW.

Mohon diberikan kepada kita, Komisi V ini pengembangan seluruh provinsi, sehingga kita tahu bahwa oh Provinsi A akan dibuat seperti ini Provinsi B dan seterusnya.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PAN (MESAKH MIRIN, SKM.):

Pimpinan, izin sebentar.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya Pak, silakan Pak, silakan.

F-PAN (MESAKH MIRIN, SKM.):

Baik.

Terima kasih langsung saja, Pak Ketua.

Nama saya Mesakh Mirin, Nomor Anggota A-521 dari Provinsi Papua Pegunungan.

Terima kasih Pak Sekjen. Saya ingin mau sampaikan berkaitan dengan program-program kita. Dan di Provinsi Papua ini kan dalam saya lihat dari judul yang dikasih itu hanya Provinsi Papua secara global sedangkan sekarang kan ada 6 provinsi di Papua dan Papua Barat. *Nah*, ini yang harus pemetaannya belum sehingga sejauhmana nanti untuk ke depan 5 tahun ke depannya seperti apa itu juga harus digambarkan.

Terus kemudian Pak Sekjen, saya ingin mau sampaikan program-program yang ada di kementerian kita ini. Misalnya di Provinsi di Papua ada Provinsi Papua Pegunungan dan itu harus pemetaan agar supaya program kita ini bisa berjalan baik. Karena ketika kita mengajukan program untuk daerah pemilihan kita tapi di sana ada gangguan-gangguan yang mungkin juga tidak diekspos tapi cukup cukup masif, sehingga program kita ini menghambat, Pak Sekjen. Dengan demikian ini secara keseluruhan juga setiap Anggota Komisi V ini kita kayak berbagai macam provinsi. Setelah di sana walikota, gubernur, ataupun setempat itu memberikan masukan-masukan secara keseluruhan tapi namun sampai di sini tidak pernah perjuangkan. Contoh kemarin kami ke Borneo, Kalimantan Timur itu dari Samarinda ke Kalimantan Timur itu mungkin kurang lebih 3 jam sampai 2 jam jalannya rusak parah, ini kita bicara *scope* nasional global ya sehingga aspirasi yang kita dapat di seluruh Indonesia itu harus ada, Pimpinan, harus ada di sini harus terealisasi, Pak. Karena ketika kita ke situ provinsi misalnya sampai di sini apa namanya itu apa masukan dari provinsi ataupun kabupaten, kota itu jarang realisasi, ini kan marwah sebagai Anggota DPR RI Komisi V itu *nggak* ada, bukan hanya satu tempat saja, 1 provinsi saja tapi secara keseluruhan.

Ketika kita misalnya tahun ini ke kabupaten itu tapi aspirasi itu ada terus dan seperti ini harus Pimpinan juga harus pro hak agar supaya ketika turun disatu provinsi itu ada *feedback*-nya, kita membantu teman-teman di provinsi itu. Karena setiap provinsi di Indonesia tidak mewakili di Komisi V ini, Pak. Misalnya contoh di Kalimantan Timur yang di kabupaten...Kota Madya Borneo itu, itu lama seklai sampai capek-capek kita nginap di sana hampir dua harian itu, Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mau sampaikan juga untuk khusus untuk Papua ini harus pemetaan, Pak Sekjen. Provinsi A, Provinsi B, gangguan apa namanya Kamtibmasnya daerah mana, supaya jangan sampai sama meratakan *oh* ini untuk Provinsi Papua klop, ini yang *nggak* bisa begitu, Pak. Jadi harus pemetaan secara cermat oleh Pak Sekjen dan teman-teman di komisi apa namanya itu di mitra kita ini agar supaya di Papua itu harus

memetakan. Ya, jujur saja kami saya dengan Pak Willem ini kami di Provinsi Papua Pegunungan. Memang di sana Kamtibmasnya selalu *on time*, tapi ada beberapa kabupaten yang memang aman, sehingga jangan menyelesaikan semua bahwa di Provinsi Papua itu gangguannya seperti itu. Jadi program-program yang kita mengajukan ini mohon agar supaya ini juga perhatian dari Pak Sekjen dan jajarannya.

Terima kasih, Pimpinan.

Cuma itu saja yang saya bisa dapat sampaikan, mohon maaf sebelumnya.

Kami kembalikan waktunya

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, memang persoalan jalan, Pak, hampir sama kita hampir seluruh Indonesia. Hari Senin kita rapat dengan Pak Dirjen Bina Marga, saya harapkan kita semua hadir di sini termasuk Bapak nanti kita sampaikan keluhan dengan saran-saran apa yang kita akan berikan kepada Pak Dirjen.

Bapak-Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati.

Ini Pak Sekjen, saya ada tadi 14 penanya dan rekan-rekan Komisi V kalau tidak keberatan ini Pak Sekjen ini kan ada kegiatan nanti menghadiri acara pelantikan, Pak Sekjen ya Eselon I. Jadi mungkin....

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Dijawab yang umum-umum saja.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Maksud saya nanti Pak Sekjen, nanti dikluster saja, tadi ada pertanyaan yang sama, jawab secara umum, nanti jika ada pertanyaan yang harus dijelaskan, nanti bisa secara tertulis.

Ya, kami persilakan kepada Pak Sekjen untuk memberikan tanggapannya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih banyak, Pimpinan.

Ibu-Bapak Anggota Komisi V yang saya hormati,

Terima kasih banyak telah memberikan *insight* baru bagi kami. Mungkin apa-apa yang kami sampaikan tadi memang terlalu apa tidak semuanya memberikan gambaran apa yang ada di kami.

Oleh karena itu, mohon izin ini yang pertama ini mungkin Pak Ali Mufthi, ini apakah PUPR tertutup terhadap apa namanya konsen atau perhatian keinginan daripada publik. Yang pasti kami terus ingin membuka diri, Pak, bahwa misalkan kemarin juga di dalam forum Pak Menteri juga sampaikan dan Ibu-Bapak Anggota menyampaikan juga, bahwa ternyata PU itu lebih cepat merespon datang ke tempat bencana dibandingkan pemerintah daerahnya. Ini sebagai bentuk gambaran, tentu sistem, kami terus bangun, bahwa apa yang kami siapkan melalui sistem informasi aplikasi macam-macam, itu bagian dari upaya kami, tapi kalau memang masih ada yang merasakan apa kesulitan untuk akses *Insya Allah handphone* saya juga 24 jam, *nggak* pernah mati dan itu biasanya ada saja. Kami mohon maaf, Pak Ali, nanti kami tidak lanjutin kalau ada hal yang tidak bisa kita bahas di sini.

Kemudian beberapa tadi usulan yang kami harus melanjutkan ke Dirjen terkait *Insya Allah*, tadi ada dari Pak Harvey, ada terutama tadi BMKG, Ibu sudah ada ralat. Jadi kelihatannya salah karena kecepatan mungkin sehingga harus mereka ralat.

Enje Bu, jadi mohon maaf ini sebenarnya kami yang kami laporkan tadi kami biasa mendeliniasi pada saat BMKG itu menyampaikan apa informasinya kami itu biasanya langsung melakukan. Jadi misalkan pada saat informasikan kemarin setelah ada perubahan, kami langsung mendeliniasi misalkan ini dalam radius 130-an kilometer kami sudah bisa melihat ada 22 bendungan di dalamnya ada 13....

F-PDI PERJUANGAN (HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Izin Pimpinan, interupsi sedikit saja.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, silakan Bu.

F-PDI PERJUANGAN (HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pak Sekjen, tolong itu disampaikan ke Pak Menteri, yang bisa negur BMKG itu hanya Menteri PU, lainnya *nggak* bakalan bisa.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Siap, Bu, siap, terima kasih.

Kemudian Bu Irine tadi, jadi kita harus memastikan bahwa ada aplikasi dan itu harus dijalankan. Di PUPR, kami tegaskan, Bu, sekarang tidak ada aplikasi yang dikerjakan oleh unit kerja apapun kecuali telah dibahas dengan Pusdatin, oleh karena itu kami sudah men-*takedown* 600 lebih aplikasi. Jadi ini menjadi bagian dari proses *reform* kita, dan memang tidak bisa disalahkan semuanya karena pada saat mereka teman-teman ini melakukan pendidikan di LAN khususnya, mereka dipersyaratkan membuat aplikasi, tetapi tahun ini kami secara tegas menolak. Mudah-mudahan yang ke depan akan menjadi jauh lebih baik tapi *Insyallah* apa-apa yang sudah kami lakukan ternyata sekarang di apa diapresiasi oleh publik dan semata-mata agar apa membuat keterbukaan dan *government* itu bisa dijalankan melalui *interoperability* dari aplikasi dan data yang kita miliki.

Kemudian, Pak Hafid, tadi untuk capaian pembangunan. Kami biasanya mengikuti apa agenda yang harus kita sajikan tetapi capaian-capaian pembangunan ini selalu bisa ikuti kalau memang diperlukan nanti kami siapkan sampai dengan tahun keempat ini apa saja. Karena itu paling tidak sekurang-kurangnya ada di LAKIP kami tetapi ini juga ada. Mungkin tadi ada pegawai, SDM, macam-macam kami terus berusaha, Pak. Jadi mohon maaf, Pak Tamanuri, kalau ada ini agendanya sejak zamannya saya sudah bisik-bisik sama Pak Khalawi, Pak, nanti kami tindaklanjuti setelah iya.

Untuk Papua, Pak Mirin, pemerintah sudah menyusun rencana dan PU tentu menjadi bagian di dalamnya. Sekarang kami sedang meneruskan lanjutkan dan mohon maaf, menindaklanjuti maksud saya, usulan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk bisa kita memproses. Harapan kita di tahun 2023 ini dan nanti tentu 2024 ada aktivitas khusus yang kita jalankan untuk DOB di Papua.

Terima kasih, Pak.

Jadi mungkin itu dari ada beberapa hal yang kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Ada tambahan lagi dari yang lain?

Apa cukup?

Pak Irjen ada tambahan sedikit.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik.

Terima kasih.

Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekjen terhadap apa yang disampaikan tadi ada pertanyaan dari Pak Ali Mufthi. Ini

juga tidak seperti itu artinya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Unor-Unor terkait contoh di kami di Inspektorat Jenderal ada satu *problem* yang ada di pemerintah daerah, itu pada saat melakukan informasi penyampaian informasi ke Irjen, itu kami dapat membantu menuntaskan hanya dua hari, Pak. Jadi kami kumpulkan Unor terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang diadakan oleh apa oleh para pihak yang dimaksudkan seperti yang disampaikan Pak Ali Mufthi tadi.

Terus sehubungan dengan kondisi pengaduan seperti apa, di Kementerian PUPR itu ada dua sistem yang bisa dipakai, jadi bisa *blowing* WISPU dan lapor PUPR itu bisa dipakai. Terus Bagaimana tata kelola pelaksanaannya? itu tadi yang seperti contoh disampaikan oleh Pak Fauzi, itu akan dilakukan apabila pengaduan yang memang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal, itu kami mempunyai prosedur di dalam tata kelola apa respon atau tindak lanjut terhadap pengaduan.

Jadi pengaduan itu kalau apabila di ditujukan kepada Inspektur Jenderal, itu akan dilakukan dengan ritual yaitu penelitian awal, apabila di situ didapatkan potensi apakah itu tidak ada indikasi terbukti atau indikasi terbukti. Jadi kalau misalnya terbukti, itu akan dilakukan dengan audit dengan tujuan tertentu dan terbukti rekomendasi tindaklanjuti oleh Unor yang menjadikan fungsi dan tanggung jawab kegiatan itu harus menindaklanjuti selama-lamanya 60 hari, dan apabila misalkan itu tidak terbukti disampaikan ke pimpinan Unor untuk menjadikan pengendalian intern di masing-masing Unor terhadap obrik yang diadakan.

Mungkin itu aja, Bapak, yang bisa kami tambahkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, Pak Kepala BPSDM ya tambahan sedikit saja, Pak ya, terakhir Bapak Kepala BPIW.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PUPR RI (DR. IR. H. KHALAWI. AH, MSC. MM.):

Terima kasih tadi semuanya Bapak-Ibu atas masukannya.

Cuman Bu Estu mungkin yang perlu sedikit saya sampaikan bahwa untuk Poltek PU itu bukan kedinasan tapi, jadi emang bukan kedinasan tapi untuk sosialisasi rasanya sudah mulai bagus ya. Dan terima kasih untuk ini kita kerja sama dengan pemerintah daerah dan SMA-SMA, kita ngadakan mengumpulkan SMA dengan di suatu provinsi gitu kita sampaikan. Dan pendaftaran terakhir tahun ini ada kurang lebih 3.400, yang diterima cuman 225 ini sudah ada peningkatan dan kita juga ada afirmasi untuk Papua, di seluruh Indonesia ada dan tahun ini ada 20 *eh* 30-an provinsi dalam daftar.

Itu aja, Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, Bapak Kepala BPIW, silakan Pak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PUPR RI (DR. IR. YUDHA MEDIAWAN, M.DEV.PLG.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Untuk produk BPIW ini di setiap provinsi perencanaannya itu adalah yang kita sebut RPIW (Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah) dimana di dalamnya itu ada fokus dan lokus. Jadi ini menjawab sekaligus beberapa pertanyaan Pak Ketua.

Terkait dengan misalnya kalau di suatu provinsi itu fokusnya mungkin saja itu kawasan industri, ataupun kawasan perkotaan, ataupun kawasan pertanian dan kawasan pariwisata, tergantung nanti mana yang menjadi fokus dan lokusnya di mana sehingga nanti dalam dokumen itu kita mencoba mengintegrasikan semua program yang ada di Kementerian PUPR dalam hal ini di bidang sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan sehingga terintegrasi dan konvergen dalam satu lokus ataupun fokus tersebut. Ini juga kaitannya dengan pengembangan-pengembangan kawasan misalnya di Pulau Jawa yang disampaikan Bu Neng Eem tadi, antara utara dan selatan, ataupun di Bali, juga itu tergambar di dalam dokumen perencanaan RPIW itu, Ibu. Termasuk juga kegiatan yang ada di lingkaran Sewilis itu beberapa kegiatan sudah dilakukan dan itu diakomodir juga dalam Perpres 80 percepatan infrastruktur yang ada di daerah Jawa Timur, dimana di sana penanganan baik dari Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya, sudah dilakukan penanganan juga.

Dan terkait dengan yang disampaikan Bu Cen Sui Lan yaitu penataan kawasan di Lingga, ini juga sudah ada dalam RPIW. RPIW ini dokumennya bisa diakses, kita ada tautannya nanti kalau memang diperlukan bisa diakses sehingga detail di dalamnya itu mana-mana saja yang menjadi fokus ataupun prioritas.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan nanti selebihnya disampaikan secara tertulis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Iya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen dan Bapak Kepala BPSD dan Kepala BPIW.

Selanjutnya masuklah kita pada draf kesimpulan tolong ditampilkan.

Draf Kesimpulan RDP Komisi V DPR RI dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit kerja Eselon I dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Jenderal, pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 sebesar 584.007.802.000 nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 578.736.341.000, ada selisih sebesar 5.221.461.000;
 - 2) Inspektorat Jenderal, pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 sebesar 136.400.000.000 nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 91.232.000.000, ada selisih sebesar 45.168.000.000;
 - 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 sebesar 611.890.525.000 nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 425.138.972.000, ada selisih sebesar 186.791.553.000;
 - 4) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, pagu kebutuhan tahun anggaran 2024 sebesar 231.777.669.000 nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 142.328.583.000, ada selisih sebesar 89.449.086.000.
2. Komisi V DPR RI bersama Sekjen, Irjen, BPSDM dan BPIW Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing unit kerja Eselon I pada tahun anggaran 2024 disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI dalam rangka rapat pembahasan RAPBN tahun 2024.
3. Komisi V DPR RI meminta Sekjen Kementerian PUPR untuk mempercepat sosialisasi terkait dengan pelaksanaan peraturan bidang PUPR di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan, serta Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Bapak-Ibu, rekan-rekan Komisi V,

Apakah ada masukan atau tambahan, saya persilakan.
Cukup?
Dari pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Setuju ya, kalau setuju kita ketok ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu,
Hadirin-hadirat yang saya hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Pak Sekjen mewakili pemerintah untuk memberikan *closing statement*.

Silakan Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (IR. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Oke.

Pimpinan Komisi V DPR RI yang saya hormati,
Ibu-Bapak para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Terima kasih banyak hari ini kita telah membahas banyak hal terutama apa yang sudah kami laporkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PPP):

Walaikumsalam

Maka demikian maka berakhirlah rapat kerja pada hari ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Jakarta, 31 Agustus 2023

a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 19691202 199803 2002